

**PERANAN ASKAR PERANG SABIL (APS) DALAM OPERASI
PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 1948**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan




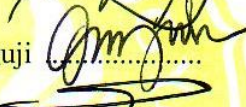

Oleh :
ESTU DWIYONO
08406241006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948” ini telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Terry Irenewaty, M.Hum.	Ketua Penguji		19-06-2012
Dyah Kumalasari, M.Pd.	Sekretaris Penguji		19-06-2012
Dr. Aman, M.Pd.	Penguji Utama		19-06-2012

Yogyakarta, Juni 2012
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948” ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan di depan Dewan Penguji skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.



Yogyakarta, 30 Mei 2012

Pembimbing

Dyah Kumalasari, M. Pd.

NIP. 19770618 200312 2 001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, penulis :

Nama : Estu Dwiyono
NIM : 08406241006
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
Judul : Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi
Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten
Gunungkidul Tahun 1948.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, skripsi ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, atau pernah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan sebagai sumber penulisan.

Pernyataan ini oleh penulis dibuat dengan penuh kesadaran dan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, Juni 2012


Penulis
Estu Dwiyono
08406241006

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah (nasib) suatu kaum apabila mereka tidak mengubah keadaannya sendiri.....”

(QS. Ar Ra’ad, 13:11)

“Barangsiapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya.”

(HR. Tirmidzi dari Anas ra.)

Take time to THINK. It is the source of power.

Take time to READ. It is the foundation of wisdom.

Take time to QUIET. It is opportunity to seek God.

Take time to DREAM. It is the future made of.

Take time to PRAY. It is the greatest power on earth.

(Author Unknown)

“aku tidak akan pernah berusaha untuk menjadi yang terbaik, aku hanya ingin terus berusaha menjadi yang lebih baik.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Tanpa sedikitpun mengurangi rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah memberiku karunia yang tak terhingga, skripsi ini kupersembahkan untuk.

- ♥ Kedua orang tuaku. Ibu Tuminah dan Bapak Pardi Wiatno. Atas limpahan doa, keikhlasan, semangat, kerja keras, dan pengorbananmu.
- ♥ Almamater tercinta Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial

Ku bingkiskan skripsi ini untuk:

- ♥ Kakakku Suharti dan Sugiyarto yang dengan ikhlas dan tanpa lelah memberikan bantuan baik moril maupun materiil.
- ♥ Adik-adikku, Septa Annisa Fitri, Mustikawati, dan Ramadhani Umarela.
- ♥ Tanah tempat dimana aku dilahirkan dan dibesarkan, Gunungkidul tercinta.

PERANAN ASKAR PERANG SABIL (APS) DALAM OPERASI PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1948

**Oleh
Estu Dwiyono
08406241006**

ABSTRAK

Peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 tidak hanya terjadi di Madiun saja, tetapi juga beberapa daerah disekitarnya, salah satunya adalah di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Banyak pihak yang terlibat di dalam operasi penumpasan pemberontakan ini, salah satunya adalah APS, sebuah organisasi kelaskaran yang didirikan oleh para ulama di Yogyakarta yang ditujukan sebagai pembantu TNI dalam menghadapi pasukan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang gerakan APS, gerakan PKI di Gunungkidul, serta peranan APS dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI di Gunungkidul pada tahun 1948.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari lima tahapan, yakni: (1) pemilihan topik, yaitu sebuah kegiatan untuk menentukan topik permasalahan yang akan dikaji, (2) heuristik, adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan sumber sejarah, (3) kritik sumber, suatu kegiatan untuk meneliti jejak atau sumber sejarah yang telah dihimpun sehingga didapatkan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, (4) interpretasi, adalah menetapkan makna dan hubungan antara fakta-fakta yang telah berhasil dihimpun, (5) historiografi, yaitu kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Askar Perang Sabil (APS) merupakan sebuah organisasi kelaskaran Islam yang sejak awal terbentuknya memang telah ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok manapun yang membahayakan keutuhan NKRI. Terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Gunungkidul bukan semata-mata imbas dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun, tetapi jauh sebelum terjadinya pemberontakan PKI Madiun, di Gunungkidul PKI sudah mulai mengumpulkan massa dan menjadikan Gunungkidul sebagai basis kekuatan PKI di DIY. Selain sebagai bentuk bantuan kepada TNI, keterlibatan APS dalam usaha penumpasan PKI juga dilatarbelakangi oleh pertentangan antara komunis dan Islam, terutama Muhammadiyah. Dalam usaha penumpasan pemberontakan PKI di Gunungkidul APS memiliki peranan yang cukup penting, peranan APS tidak hanya ketika terjun di medan perang saja, tetapi mereka juga banyak memiliki peranan di belakang garis pertempuran, dengan segala kelebihan kekuatan spiritual yang dimiliki, mereka bisa menjadi pelindung bagi para pejuang yang lain.

Kata Kunci : Askar Perang Sabil, PKI, Kabupaten Gunungkidul.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dari seluruh semesta semoga tetap tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah SAW, junjungan serta sumber inspirasi penulis dalam menulis skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya sederhana yang diperuntukkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta ini dapat terlaksana berkat dukungan dari lingkungan sekitar. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin dan berbagai kemudahan kepada penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi.
3. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku Wakil Dekan III FIS UNY sekaligus sebagai ketua penguji yang telah memberikan motivasi serta bimbingannya selama ini.
4. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi serta nasehat kepada penulis.

5. Ibu Dyah Kumalasari, M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Aman, M.Pd., selaku penguji utama yang telah memberikan berbagai arahan dan berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ibunda dan Ayahanda tercinta, tidak ada satupun kalimat yang mampu mewakili dalam menggambarkan betapa besar jasa beliau berdua bagi penulis.
9. Kakakku tersayang, Mbak Suharti dan Mas Sugiyarto, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, baik yang berupa moril maupun materil yang tak ternilai lagi seberapa banyaknya.
10. Keponakanku, Septa Annisa Fitri yang selalu membuat penulis tersenyum dan terinspirasi untuk terus menjadi lebih baik.
11. Semua Staf Perpustakaan UPT UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Kolose ST. Ignatius, Perpusda Kab. Gunungkidul, Jogja Library Center, dan Kantor Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, terimakasih banyak atas pelayanan dan bantuannya kepada penulis sehingga sumber kajian dapat penulis peroleh.
12. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak informasi penting kepada penulis.

13. Seluruh pengurus lab. Sejarah, terimakasih atas kesabaran dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam mencari berbagai sumber referensi dan mengurus surat-surat yang terkait dalam penyusunan skripsi.
14. Mereka yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material kepada penulis, Afeb, Asep, Alim, Bang Heri, Criz, Hengky, Annisa, Rhiriz, Huda, Fredika, Fredita, Yermia, Miftha, Eko, Ferdi, Adi Kribo.
15. Seluruh Mahasiswa Pendidikan Sejarah 2008 R, Panji, M. Bagus, Henry, Fina, Fitri, Wiji, Duwi, Franky, Burhan, Siti, Tita, Widya, Ernila, Reno, Inggit, Rieska, Yovi, Desi, Waidkha, Wahyu S, Zeni, Bagus Bayu, Jihad, Dhira, Yayuk, Risty, Eka, Aditya, Wahyu P, (semoga tidak ada yang terlewatkan) dan teman-teman 2008 NR yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas persahabatan yang telah terjalin selama ini dan semoga tidak akan pernah terputus.
16. Keluarga besar HMPS, Danu, Andra, Ragil, Rahmad, Bangkit, Tepe, Naafi, Vian, Mey, Winda, dan mereka semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sebuah kebahagiaan dan kebanggaan pernah berkumpul dengan orang-orang luar biasa seperti kalian.
17. Teman-teman KKN-PPL SMAN 1 Godean, terimakasih atas kerjasama yang singkat namun memiliki kesan mendalam bagi penulis.
18. Teman-teman The Brandal's Comunity, terima kasih sudah memberikan sebuah bentuk persaudaraan dan kebersamaan terbaik selama ini, we'll always together.

19. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memperlancar jalannya penelitian dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi karya yang bermanfaat.

Yogyakarta, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Historiografi yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	16
H. Pendekatan Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II ASKAR PERANG SABIL (APS) YOGYAKARTA

A. Terbentuknya APS	26
1. Faktor Pendorong Terbentuknya APS	26
2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan APS	29
3. Landasan Perjuangan APS	33
B. Pembinaan APS	36
1. Pemantapan Ideologi	36
2. Pelatihan Fisik dan Militer	39
3. Pembinaan Organisasi	41
C. Dukungan terhadap APS	44
1. Dukungan dari Pemerintah	44
2. Dukungan dari TNI dan Badan Perjuangan Lain	47
3. Dukungan dari Masyarakat	49

BAB III GERAKAN PKI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Kondisi Gunungkidul pada Masa Awal Kemerdekaan	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Sosial Ekonomi	55
3. Kondisi Politik Pemerintahan	58
B. Gunungkidul Basis PKI di DIY	63
1. Kebangkitan Kembali PKI	63
2. PKI Memanfaatkan Keadaan Masyarakat Gunungkidul	67
3. Kaderisasi PKI di Gunungkidul	69
C. Dari Peristiwa Madiun ke Gunungkidul	73

1. Madiun sebagai Basis Utama Gerakan FDR/PKI	73
2. Aksi PKI di Madiun	76
BAB IV USAHA ASKAR PERANG SABIL (APS) DALAM OPERASI	
PENUMPASAN PKI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
A. Menentang Aksi PKI	80
1. Pertentangan APS dan PKI	80
2. Mengobarkan Semangat <i>Jihad Fii Sabillilah</i> Melawan PKI	86
B. Berjuang Bersama TNI	89
1. Menggagalkan Rencana PKI Menguasai Gunungkidul	89
2. Sebagai Perisai Para Pejuang	92
3. Menumpas Pemberontakan PKI	97
C. APS Pasca Penumpasan Pemberontakan PKI di Gunungkidul	105
1. Menghadapi Agresi Militer Belanda II	105
2. Kembali Ketengah-tengah Masyarakat	110
BAB VI KESIMPULAN	113
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Struktur Organisasi MUAPS	123
2. Salinan Serat Kekancingan	124
3. Tokoh-tokoh Askar Perang Sabil (APS).....	125
4. Lambang PKI dan Tokohnya, Amir Syarifuddin.	126
5. Tokoh-tokoh Sipil yang Mendukung Terbentuknya APS	127
6. Tokoh-Tokoh Militer yang Mendukung Terbentuknya APS.....	128
7. Bendera APS	129
8. Markas dan Tempat Latihan APS di Yogyakarta.....	130
9. Salah Satu Tempat Terjadinya Peristiwa Pemberontakan PKI di Gunungkidul.....	131
10. Peta Pemberontakan PKI di Gunungkidul Tahun 1948.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ki Bagus Hadikusumo, penasehat APS.....	125
2. K.R.H. Hadjid, Ketua APS	125
3. Palu Arit, lambang Partai Komunis Indonesia.....	126
4. Amir Syarifuddin, Ketua FDR/PKI Tahun 1948	126
5. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur DIY	127
6. K.R.T. Suryaningrat, Bupati Gunungkidul	127
7. Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI.....	128
8. Bung Tomo, salah satu pelatih kemiliteran APS	128
9. Bulan Bintang di atas lafadz kalimat Syahadat pada bendera APS	129
10. Masjid Agung Yogyakarta tempo dulu.....	130
11. Alun-alun Utara Yogyakarta	130
12. Alun-alun Kabupaten Gunungkidul	131
13. Sketsa peta pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul.....	132

DAFTAR SINGKATAN

AOI	: Angkatan Oemat Islam
APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
APS	: Askar Perang Sabil
AS	: Amerika Serikat
BBI	: Barisan Buruh Indonesia
BKPRI	: Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
B.P.H.	: Bendera Pangeran Haryo
BPRI	: Barisan Pemberontak Republik Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
Gassema	: Gabungan Sekolah-sekolah Menengah Mataram
<i>ISDV</i>	: <i>Indische Social Demokratische Vereniging</i>
KDM	: Komando Distrik Militer
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KODM	: Komando Onder Distrik Militer

K.R.H.	: Kanjeng Raden Haryo
K.R.T.	: Kanjeng Raden Tumenggung
Masyumi	: Majelis Syuro Muslim Indonesia
MKR	: Marine Keamanan Rakyat
MUAPS	: Markas Ulama Askar Perang Sabil
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Paras	: Partai Rakyat Sosialis
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parsi	: Partai Sosialis Indonesia
Pepolit	: Pendidikan Politik Tentara
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKN	: Partai Kristen Nasional
PKRI	: Partai Katolik Republik Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPDI	: Persatuan Pamong Desa Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PRI	: Pemuda Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SI	: Sarekat Islam
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
STII	: Sarekat Tani Islam Indonesia

S-TC	: Sub Teritorial Comando
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Republik Indonesia
TRM	: Tentara Rakyat Mataram

DAFTAR ISTILAH

Askar	: Persamaan dari kata Laskar, yang berarti pasukan atau tentara.
<i>Bai'at</i>	: Pelantikan atau pengukuhan.
Blokade ekonomi	: Penutupan jalur-jalur perekonomian yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap suatu wilayah untuk mencegah masuk dan keluarnya barang-barang yang memiliki nilai ekonomis.
Doktrin	: Ajaran
Efek domino	: Efek yang ditimbulkan oleh peristiwa lain dan memberikan pengaruh secara langsung.
Granggang	: Senjata tradisional sejenis parang.
Imam	: Pemimpin.
<i>I'tikaf</i>	: Berdiam diri untuk memohon petunjuk dari Allah
<i>Jihad Fii Sabillilah</i>	: Berperang di jalan Allah. Sebuah ajaran Islam yang memerintahkan untuk memerangi kejahatan.
Kepanewonan	: Wilayah administratif yang terdiri dari beberapa kalurahan atau desa. Sekarang setingkat kecamatan
Kyai	: Pemuka agama (Islam)
Pamong desa	: Perangkat atau pegawai Kalurahan (desa) yang terdiri dari lurah dan staf-stafnya.
Perbentengan	: Perlindungan
Provokasi	: Ajakan yang berupa hasutan.
<i>Sabda pandhita ratu</i>	: Keputusan atau sabda dari seorang raja sama dengan sabda seorang pendeta yang selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan, sehingga sabda

tersebut dianggap sebagai sebuah keputusan yang tidak dapat siragukan lagi kebenarannya.

SI Merah	: Sarekat Islam Merah adalah pecahan dari SI yang anggota-angotanya terkena paham komunis.
SI Putih	: Sarekat Islam Putih adalah pecahan dari SI yang menolak adanya paham komunis dalam tubuh SI.
Tanah lemarengan	: Tanah tadah hujan pada saat musim kemarau.
Tanah tadah hujan	: Tipe tanah yang tidak dapat menampung air pada permukaannya, tipe tanah ini hanya dapat digunakan untuk menanam padai pada musim penghujan.
Tentara Hijrah	: Tentara dari Divisi Siliwangi yang melakukan hijrah (pindah) dari Jawa Barat (RIS) ke wilayah RI sebagai akibat dari hasil Perundingan Renville..
Titah	: Perintah atau amanat yang diberikan oleh seorang raja kepada rakyat ataupun bawahannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa-masa awal kemerdekaan dikenal juga sebagai masa revolusi fisik, saat seluruh bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik itu ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari berbagai lapisan masyarakat yang ada, tentu tidak dapat ditinggalkan adanya peranan dari para ulama. Pada saat itu, ulama memiliki peranan yang sangat penting di dalam menggerakkan umat dan rakyatnya tergabung dalam laskar-laskar kerakyatan yang penuh semangat melakukan perlawanan terhadap imperialisme Belanda dan juga gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh beberapa oknum dari bangsa Indonesia sendiri.

Besarnya peranan ulama di dalam memimpin perlawanan rakyat tidak lepas dari berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh seorang ulama, sehingga para ulama memiliki peran yang cukup dominan dan efektif dalam mempersatukan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Atas dasar kemampuan para ulama tersebut, mereka juga mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin lokal yang kharismatis, yang dipatuhi oleh masyarakat di lingkungannya.¹ Melihat situasi Republik yang semakin kacau karena adanya

¹ Mohammad Iskandar, (dkk)., *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 10.

rangkaian Agresi Militer Belanda di Yogyakarta dan tempat-tempat lain di Indonesia, maka timbul keprihatinan dari para ulama untuk ikut berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (RI). Hal inilah yang mendorong para ulama Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 1947 secara resmi mendirikan sebuah badan kelaskaran yang bernama Markas Ulama Askar Perang Sabil (MU-APS).²

Dalam upaya mengakhiri konflik antara pihak RI dan Belanda, maka pada tanggal 17 Januari 1948 ditandatangani Perjanjian Renville oleh Amir Syarifuddin. Ternyata perjanjian tersebut menimbulkan kekecewaan bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia terutama militer. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis kabinet dengan ditariknya wakil-wakil Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) dari Kabinet Amir Syarifuddin yang kemudian diikuti pula oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menuntut dibubarkannya Kabinet Amir Syarifuddin. Perpecahan antara golongan kanan dan golongan kiri semakin memuncak setelah dibubarkannya Kabinet Amir Syarifuddin dan dibentuknya Kabinet Hatta yang sama sekali tidak melibatkan golongan kiri di dalam susunan kabinetnya.³

Muhammad Hatta sebenarnya menawarkan tiga kursi untuk golongan kiri, akan tetapi golongan kiri meminta paling sedikit empat kursi termasuk di

² Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1996, hlm. 20.

³ Tashadi, (dkk)., *Keterlibatan Ulama di DIY pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 65.

dalamnya terdapat jabatan Menteri Pertahanan, sehingga keinginan dari golongan kiri tersebut ditolak. Salah satu alasan golongan kiri meminta jabatan Menteri Pertahanan dikarenakan selama ini jabatan tersebut menjadi “perbentengan” golongan kiri sejak tahun 1945.⁴ Pembersihan golongan kiri dari Kabinet Hatta ini menurut Soemarsono⁵ memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan pengakuan kedaulatan dari pihak Barat (AS). Hal ini dikarenakan pihak Barat bersedia membantu Indonesia mendapatkan kedaulatannya dengan syarat tidak ada lagi orang-orang kiri (komunis) dalam pemerintahan RI.⁶

Pada tanggal 26 Februari 1948 Amir Syarifuddin⁷ selanjutnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta yang anggotanya terdiri dari partai-partai seperti PKI, Partai Sosialis, serta Partai Buruh Indonesia, dengan tujuan

⁴ A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8, Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1979, hlm. 13.

⁵ Soemarsono merupakan seorang pelaku utama dalam beberapa peristiwa penting bangsa Indonesia. Peristiwa yang pertama adalah pertempuran Indonesia melawan Sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dalam peristiwa tersebut Soemarsono oleh Rosihan Anwar disebut sebagai “Pimpinan Pertempuran Pemuda Surabaya”, yang mana dari peristiwa ini mendekatkan Soemarsono dengan Bung Karno. Peristiwa kedua yang melibatkan Soemarsono adalah Peristiwa Madiun 19 September 1948. Dalam peristiwa tersebut Soemarsono dianggap sebagai penanggungjawab operasional, bersama Musso sebagai penanggungjawab politik, dan Amir Syarifuddin sebagai penanggungjawab militer. Dalam, Hersri Setiawan, *Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*. Forum Studi Perubahan dan Peradaban (FUSPAD). 2000.

⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

⁷ Foto Amir Syarifuddin sebagai ketua FDR/PKI, lihat lampiran 4 gambar 4.

untuk menyusun kekuatan menentang Kabinet Hatta.⁸ Pertentangan antara FDR dengan golongan kanan semakin memuncak dan diwujudkan dengan pertentangan fisik di berbagai daerah. Pemberontakan ini dilakukan dengan berbagai kekerasan dan pembantaian terhadap kaum nasionalis birokrat, dan kaum muslimin, yaitu para kyai, santri pondok serta aktivis muslim, sehingga ribuan korban pun berjatuhan.⁹

Pada pertengahan bulan September 1948 pertempuran terbuka antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro-pemerintah terjadi di Surakarta. Pada tanggal 17 September, Divisi Siliwangi berhasil memukul mundur para pendukung PKI dari Surakarta. Dari Surakarta, pasukan PKI ini mundur ke Madiun. Di Madiun mereka kemudian berkumpul dengan satuan-satuan pro-PKI lainnya untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan yang diperkirakan akan dilancarkan oleh pemerintah terhadap Madiun.¹⁰

Pada tanggal 18 September terjadi pemberontakan komunis di Madiun. Suasana semakin genting setelah pada tanggal 19 September 1948 pukul 22.00 WIB Presiden Sukarno mengadakan pidato melalui radio agar rakyat memilih antara Musso-PKI atau Sukarno-Hatta. Pada tanggal yang sama, melalui radio, Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Soengkono di Jawa Timur untuk

⁸ Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektif Struktural". *Prisma*, No. 8, Agustus 1981, hlm. 4.

⁹ Ahmad Adabi Darban, "Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS)". *Istoria*, Vol. 3 No. 1, September 2007, hlm. 14.

¹⁰ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*. a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 344.

menumpas Musso. Kolonel Soengkono pun langsung memerintahkan Brigade Surachmad untuk bergerak ke Madiun dengan pasukan di bawah pimpinan Panglima Operasi Mayor Jono Sewojo.¹¹

Peristiwa pemberontakan PKI ini kemudian menjalar tidak hanya di Madiun saja, tetapi juga ke daerah Grobogan, Purwodadi, Kudus, Ponorogo, Wonogiri, bahkan ke beberapa daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terutama Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dipengaruhi oleh letak Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang pada saat itu sedang mengalami gangguan keamanan yang disebabkan oleh pasukan PKI-Musso.

Selain dipengaruhi oleh faktor letak geografis yang berbatasan dengan beberapa daerah di Jawa Tengah yang sedang mengalami kekacauan pemberontakan pasukan komunis, faktor internal sendiri juga memberikan pengaruh atas munculnya pemberontakan pasukan komunis di DIY terutama di Kabupaten Gunungkidul. Faktor tersebut salah satunya adalah faktor ekonomi. Pada masa awal kemerdekaan ini perekonomian DIY sangatlah buruk, apalagi setelah ditetapkannya DIY menjadi Ibukota RI. DIY harus menerima akibat tindakan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda berusaha untuk menutup jalur-jalur ekonomi DIY yang selama ini menghidupinya.¹² Dalam

¹¹ Maksun, (dkk)., *Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 91.

¹² Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hlm. 343.

kondisi yang demikian, maka masyarakat akan menjadi mudah terprovokasi untuk membantu gerakan komunis.

Setelah pemberontakan di Madiun mengalami kegagalan, maka PKI melakukan aksi serupa di Gunungkidul. Selain hampir saja berhasil menghasut para petani untuk mengepung dan menyerang kantor pemerintah daerah Gunungkidul, mereka juga membuat kekacauan di beberapa wilayah seperti Semin, Ponjong, dan Rongkop. Melihat kondisi yang demikian, maka TNI dibantu oleh pasukan APS dan masyarakat Gunungkidul bahu-membahu menumpas gerombolan PKI yang semakin meresahkan masyarakat. Berkat kerjasama yang baik antara, TNI, Polisi, Pasukan APS dan segenap lapisan masyarakat yang lainnya, pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul dapat dipadamkan.

Perjuangan APS dalam usaha penumpasan PKI di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1948 merupakan bagian kecil dari peranan APS dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI. Karena masih banyak peranan-peranan APS di tempat dan peristiwa lain yang dapat menggambarkan semangat juang umat Islam di DIY pada masa awal kemerdekaan dalam mempertahankan keutuhan NKRI, namun penulis tertarik mengkaji tentang peranan APS dalam usaha penumpasan PKI di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1948 ini dikarenakan mengingat pada waktu itu Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari wilayah DIY benar-benar masih merupakan salah satu daerah tertinggal, namun dibalik segala keterbatasan tersebut ternyata masyarakat Gunungkidul dan khususnya pasukan APS masih mampu menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut;

1. Seperti apakah gambaran umum gerakan Askar Perang Sabil (APS)?
2. Bagaimana gambaran umum gerakan PKI di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apa sajakah usaha yang dilakukan oleh Askar Perang Sabil dalam menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
 - a. Melatih penulis di dalam menerapkan metodologi penulisan sejarah secara kritis yang telah didapat pada saat mengikuti perkuliahan, sehingga dapat memperoleh wawasan kesejarahan dan menghasilkan karya sejarah yang baik.
 - b. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta sistematis dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah.
 - c. Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menjelaskan gambaran umum tentang gerakan Askar Perang Sabil.
 - b. Mendeskripsikan gambaran umum gerakan PKI di Kabupaten Gunungkidul.

- c. Mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh Askar Perang Sabil dalam menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif.
- c. Menambah pengetahuan penulis tentang peranan Askar Perang Sabil dalam upaya penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Gunungkidul.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan pembaca mengenai khasanah kesejarahan, sehingga dapat menilai peristiwa sejarah dengan kritis dan objektif.

- b. Memberi gambaran bagi pembaca mengenai sejarah perjuangan Askar Perang Sabil dalam upaya penumpasan pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul tahun 1948.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk senantiasa mengisi kemerdekaan dan meneladani semangat kepahlawanan para pendahulu.

E. Kajian Pustaka

Pada tanggal 4 Januari 1946, menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia pada umumnya, dan rakyat Yogyakarta pada khususnya, karena sejak saat itu Ibukota Republik Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Seiring dengan berpindahnya Ibukota RI ke Yogyakarta, daerah Yogyakarta kemudian menjadi sasaran utama Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Hal tersebut telah disadari oleh para pejuang Yogyakarta khususnya para ulama, sehingga timbul keinginan untuk mengaktifkan kembali organisasi-organisasi kelaskaran yang dimaksudkan agar dapat membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam usaha membantu TNI untuk tetap mempertahankan keutuhan NKRI maka pada tanggal 23 Juli 1947 secara resmi terbentuklah Askar Perang Sabil (APS) sebagai wadah untuk mengorganisir pemuda-pemuda Islam yang akan ikut berpartisipasi di dalam usaha mempertahankan kedaulatan RI, sedangkan wadah organisasi pemimpinnya dikenal dengan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MU-APS). Mengenai latar belakang, sejarah berdirinya, serta aktifitas dari Askar

Perang Sabil (APS) ini akan penulis kaji melalui buku karya Suratmin yang berjudul *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*, yang diterbitkan oleh Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta pada tahun 1996.

Kondisi geografis dan masyarakat di Gunungkidul ternyata memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan PKI di Gunungkidul. Secara geografis Gunungkidul merupakan bagian dari Provinsi DIY yang terletak disebelah tenggara yang berbatasan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Indonesia. Letaknya yang berada pada ketinggian dan cukup jauh dari pusat kota Yogyakarta membuat perkembangan paham komunis di daerah ini kurang begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Yogyakarta. Faktor geografis tersebut ternyata juga membawa dampak pada kondisi masyarakat Gunungkidul, sehingga sampai pada masa awal kemerdekaan masyarakat Gunungkidul masih dikenal sebagai masyarakat miskin dan tertinggal.

Dalam usahanya mendapatkan pengaruh di Gunungkidul, PKI memanfaatkan organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia) yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh lama Partai Komunis di DIY. Melalui BTI mereka banyak melakukan propaganda serta janji yang muluk-muluk untuk membuat kaum tani di Gunungkidul tertarik masuk ke dalam BTI dan selanjutnya PKI. Selain BTI, untuk memperkuat kedudukannya di Gunungkidul, PKI juga memanfaatkan adanya PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia) bahkan juga melalui Badan Eksekutif tingkat kabupaten. Adanya dua organisasi tersebut dan ditunjang

dengan kader-kader yang militan dari PKI ternyata mampu menjadikan Gunungkidul sebagai basis gerakan mereka di Provinsi DIY.

PKI menjadi sebuah partai yang paling baik dalam pembinaan organisasi dan disiplin para kadernya, mereka begitu taat dalam mengikuti pimpinan partai, termasuk mereka yang tergabung dalam PPDI. Hal ini ternyata menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pamong desa dengan pamong praja di Gunungkidul, ketidak harmonisan ini disebabkan tidak ada seorang pamong praja pun yang memiliki hubungan dengan PKI. Para pamong desa selanjutnya menganggap bahwa kedudukan mereka tidak lebih di bawah seorang penewu, sehingga mereka tidak lagi menghargai panewu sebagai seorang yang kedudukannya berada di atas mereka. Hubungan yang tidak harmonis ini selanjutnya membawa pengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Gunungkidul, karena sering sekali terjadi keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh pamong desa kepada penewu.¹³

Perkembangan PKI di Kabupaten Gunungkidul ini akan penulis kaji melalui buku yang berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta* yang berjudul asli *Social Changes in Yogyakarta* karya Selo Soemardjan yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1990. Meskipun tidak membahas secara khusus mengenai perkembangan PKI di Kabupaten Gunungkidul maupun DIY, namun dari buku tersebut dapat dilihat bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat DIY seiring perkembangan waktu.

¹³ Selo Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*. a.b. H.J. Koesoemanto. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 129-130.

Lahirnya berbagai partai politik di Yogyakarta maupun Indonesia secara umum ternyata juga membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial dalam masyarakat, salah satunya adalah perkembangan PKI yang banyak memberikan perubahan terhadap tatanan masyarakat di DIY khususnya Gunungkidul.

Perjuangan atau usaha apa saja yang dilakukan oleh APS dalam usaha penumpasan pemberontakan PKI di Gunungkidul sampai pada akhir perjuangannya akan penulis kaji melalui buku karya Tashadi yang berjudul *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, yang diterbitkan oleh Depdiknas di Jakarta pada tahun 2000. Selain buku tersebut, karena aksi PKI di Gunungkidul ini tidak bisa dilepskan dengan adanya peristiwa *Madiun Affairs*, yang kemudian pada era orde baru lebih dikenal sebagai pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada pertengahan bulan September 1948, maka penulis juga menggunakan buku karya A.H. Nasution yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8, Pemberontakan PKI 1948*, yang diterbitkan oleh Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung pada tahun 1979, sebagai bahan kajian penelitian ini.

Aksi pemberontakan PKI tahun 1948 tidak hanya terjadi di Madiun serta daerah-daerah di sekitarnya, tetapi juga menjalar hingga ke DIY khususnya di daerah Gunungkidul. Pada tanggal 1 Oktober siang terjadi pertempuran antara tentara hijrah dengan pengacau di Semin. Pada sore harinya, ada kabar bahwa di Manyaran (sebelah timur Semin) terdapat kekuatan Tentara Rakyat (PKI Muso) kurang lebih delapan ratus orang yang merupakan gabungan dari laskar campuran dan satu kompi pasukan khusus. Dari Nglipar juga dilaporkan bahwa Penewu

Nglipar yang akan menghadiri rapat di Kelurahan Tegalrejo ditangkap oleh Pemuda Rakyat yang berasal dari Klaten. Hal yang sama juga dialami oleh Asisten Wedono Manyaran Semin yang diserobot pada tanggal 2 Oktober 1948, sedangkan di Ponjong, Penewu, juru tulisnya, serta pegawai lain juga diculik oleh gerombolan pengacau. Untuk mencegah semakin parahnya keadaan maka dikirim beberapa anggota polisi dengan segala keterbatasannya ke daerah-daerah tersebut.¹⁴

Pergolakan yang ditimbulkan oleh PKI terus terjadi di Gunungkidul. Terjadi ketegangan di Baran (Rongkop), sehingga diperlukan pengiriman polisi serta tentara dari Yogyakarta ke daerah tersebut. Berkat kerjasama APS dan TNI dari Divisi Siliwangi pasukan PKI yang membuat kerusuhan berhasil dipukul mundur menuju Wonogiri.¹⁵

Akibat pemberontakan PKI Muso yang berpusat di Madiun ini, Kabupaten Gunungkidul juga mengalami banyak kerugian. Dari kepegawaian misalnya, banyak pegawai-pegawai pemerintah yang terlibat di dalam Front Demokrasi Rakyat yang berbau komunis, sehingga banyak di antara mereka yang ditahan. Dari sektor ekonomi lebih parah lagi, bahan makanan menjadi susah dicari, bahkan beras bisa dikatakan langka.¹⁶

Sedangkan bagi pasukan APS sendiri, ini merupakan wujud pengabdian mereka bagi NKRI. Dalam perjuangannya menghadapi pemberontakan PKI di

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁵ Ahmad Adabi Darban, *loc.cit.*

¹⁶ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 119-120.

Ponorogo dan Gunungkidul, APS dikawal oleh Imam Rokhaniyah yaitu KH. Dalhar BKN. dan KH. Dimiyati. Selama perjuangannya menghadapi gerakan PKI 1948 baik yang terjadi di Gunungkidul maupun tempat-tempat atau medan pertempuran yang lain, sejumlah dua puluh lima orang anggota APS gugur, mereka kemudian dimakamkan di makam Syuhada Kauman Yogyakarta.¹⁷

F. Historiografi yang Relevan

Sebelum melakukan karya sejarah kritis, penggunaan historiografi yang relevan merupakan suatu hal yang pokok yang tidak dapat ditinggalkan. Historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Fungsi dari historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan keaslian (orisinalitas) sebuah karya ilmiah. Adanya penjelasan mengenai perbedaan penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tentunya sudah cukup untuk menunjukkan orisinalitas karya ilmiah.¹⁸

Berawal dari penjelasan mengenai historiografi yang relevan tersebut, maka penulis menemukan beberapa historiografi yang relevan dengan penulisan yang akan diajukan, yaitu sebagai berikut.

Pertama adalah skripsi yang berjudul *Askar Perang Sabil: Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Kemerdekaan RI di DIY (1945-1949)* yang ditulis oleh Nur'aini Setiawati, mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UGM. Skripsi

¹⁷ Ahmad Adabi Darban, *loc.cit.*

¹⁸ Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY, 2006, hlm. 3.

ini membahas tentang latar belakang dibentuknya APS sampai pada peranannya pada masa perang kemerdekaan pada tahun 1945-1949. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1988 ini lebih menyoroti APS dari sudut pandang sosio-religius. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan serta periode atau batasan waktu dalam objek penelitian yang tidak sama.

Skripsi yang kedua berjudul *Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Perang Kemerdekaan di Yogyakarta (1947-1949)* yang ditulis oleh Maryanti mahasiswi Pendidikan Sejarah FIS UNY. Skripsi tersebut mengkaji tentang sejarah terbentuknya APS di Yogyakarta, kiprah APS sebelum agresi militer Belanda II, sampai perjuangan APS pada masa perang kemerdekaan di Yogyakarta. Perbedaan antara skripsi karya Maryanti dan penulis adalah pada pembahasan serta periode atau batasan waktu dalam objek penelitian, karena penulis lebih memfokuskan pada peranan APS di dalam penumpasan pemberontakan PKI di Gunungkidul pada tahun 1948.

Selain skripsi, penulis juga menggunakan buku sebagai bahan historiografi yang relevan. Buku yang pertama adalah *Askar Perang Sabil sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*, karya Suratmin yang diterbitkan oleh Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta pada tahun 1995. Pada tulisan ini Suratmin banyak membahas mengenai APS mulai dari latar belakang pembentukan, perkembangan, serta berbagai peranan APS pada masa revolusi fisik tahun 1945-1949. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah fokus pembahasannya serta batasan waktu atau periode.

Buku yang kedua adalah yang ditulis oleh Tashadi dkk., dalam karyanya yang berjudul *Keterlibatan Ulama DIY pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949* terbitan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta tahun 2000. Karya ini membahas tentang bagaimana kondisi DIY pada awal kemerdekaan, bagaimana aktifitas ulama di DIY pada periode 1945-1949, serta keterlibatan ulama di DIY pada masa revolusi fisik pada tahun 1945-1949. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan serta periode atau batasan waktu dalam objek penelitian. Karena penulis lebih memfokuskan pada peranan APS di dalam penumpasan pemberontakan PKI di Gunungkidul pada tahun 1948.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, melakukan penelitian secara kritis dalam bentuk lisan.¹⁹ Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sejarah menurut Kuntowijoyo, yang mana menurutnya terdapat lima metode di dalam penulisan sejarah, yaitu sebagai berikut:²¹

¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999, hlm. 43.

²⁰ Louis Gottschalk, *Understanding History*. a.b. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 94.

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm. 91.

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik yaitu sebuah kegiatan untuk menentukan topik permasalahan yang akan dikaji, tentunya ini merupakan sebuah langkah awal dalam suatu penelitian. Topik yang dipilih harus berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.²² Hal ini sangat dibutuhkan agar dapat mempermudah dalam proses penelitian dan dapat mendalami masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Karena alasan tersebut maka penulis memilih topik tentang peranan APS dalam penumpasan pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul.

Penulis merasa tertarik dengan topik tersebut dikarenakan mengingat peranan yang cukup besar para ulama khususnya para pejuang APS di dalam peristiwa tersebut, namun ternyata masih banyak yang belum tahu apa itu APS, bahkan bagi masyarakat DIY dan Gunungkidul sendiri pada saat ini. Selain itu penulis juga memiliki kedekatan emosional dengan Kabupaten Gunungkidul yang merupakan tempat tinggal penulis.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan atau menemukan sumber sejarah berupa materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi.²³ Sumber sejarah menurut bahannya dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Terkait dengan kegiatan heuristik ini penulis

²² *Ibid.*

²³ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 29.

melakukan pencarian terhadap buku, jurnal, majalah, surat kabar, tulisan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan juga sumber internet yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau alat mekanis seperti Diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya atau yang dikenal dengan saksi mata.²⁴

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba menggunakan sumber primer yang berupa hasil wawancara dengan lima orang pelaku sejarah. Salah satunya adalah dengan Parmo Sentono (82) yang merupakan bekas relawan APS dalam usaha penumpasan PKI di Baran (Rongkop). Selain hasil wawancara, penulis juga menggunakan sumber sezaman yang berupa surat kabar, antara lain adalah harian *Kedaulatan Rakjat* terbitan Selasa Wage, 28 September 1948, isinya merupakan keterangan dari Letkol. Latif (komandan pasukan pengawal Kepresidenan) yang memberitakan bahwa Jogja telah kembali berada di tangan militer dan sebentar lagi akan kembali aman.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku atau saksi dari peristiwa tersebut, dengan kata lain

²⁴ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

hanya tahu dari kesaksian orang lain.²⁵ Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Suratmin. (1996). *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949* Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra.

Tashadi, (dkk.), (2000). *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Depdiknas.

Mohammad Iskandar, (dkk.). (2000). *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi merupakan suatu proses pengujian dan menganalisa secara kritis mengenai keotentikan sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Verifikasi ada dua macam; autentisitas, atau keaslian sumber, atau kritik ekstern dan kredibilitas atau kritik intern.²⁶ Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Sedangkan kritik intern berhubungan dengan kredibilitas sumber atau sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

²⁵ I Gde Widja, *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, hlm. 18.

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. *op.cit.*, hlm. 34.

²⁷ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm.132.

4. Interpretasi

Interpretasi adalah menetapkan makna dan hubungan antara fakta-fakta yang telah berhasil dihimpun.²⁸ Peneliti berusaha menghubungkan fakta yang ada guna menemukan generalisasi dalam memahami kenyataan sejarah. Fakta sejarah yang ada dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain, sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain menjadi rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan satu kesatuan.²⁹ Jadi interpretasi dapat diartikan sebagai langkah untuk menafsirkan keterangan sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh sebab itu di dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subjektifitas dalam kajian sejarah. Subjektifitas sejarawan memang diakui akan tetapi harus dihindari.³⁰

5. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.³¹ Tahap ini merupakan tahap penulisan sejarah yang disusun secara logis menurut urutan kronologis dan sistematis. Untuk melukiskan peristiwa sejarah secara kronologis, obyektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi dalam peristiwa itu, maka

²⁸ Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI-DEPHANKAM, 1971, hlm. 17.

²⁹ I Gde Widja, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Salatiga: Satya Wacana, 1988, hlm. 23.

³⁰ Sardiman AM., *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publising, 2004, hlm. 106.

³¹ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

imajinasi peneliti memegang peranan penting. Jadi historiografi adalah berusaha melukiskan peristiwa secara kronologis, logis dan sistematis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atas fakta-fakta tersebut, sehingga akan dihasilkan suatu kisah sejarah yang ilmiah. Hasil dari historiografi ini adalah skripsi yang berjudul “Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948.”

H. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian sejarah akan sempurna jika memakai pendekatan multidimensional. Penggunaan pendekatan multidimensional akan mengurangi sisi subjektifitas penulis, karena penulis dapat memandang dari berbagai macam sudut pandang. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948” ini penulis menggunakan pendekatan sosial, ekonomi, politik, agama, geografis, dan militer.

Pendekatan sosial merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang terkait dengan ikatan adat, kebiasaan, kehidupan, tingkah laku, dan keseniannya.³² Melalui pendekatan ini penulis akan mengkaji tentang kondisi sosial masyarakat

³² Hasan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 82.

Gunungkidul dan DIY pada umumnya yang mempengaruhi terbentuknya APS dan berkembangnya PKI.

Pendekatan ekonomi adalah penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi produksi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya, yang diungkapkan peristiwa itu atau fakta dalam kehidupan ekonomi sehingga dapat dipastikan hukum kaidahnya.³³ Dalam skripsi ini pendekatan ekonomi digunakan untuk melihat kondisi ekonomi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Gunungkidul dan DIY pada masa awal kemerdekaan. Yang mana karena kondisi ekonomi inilah akan banyak terjadi tindak kriminalitas di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Membahas mengenai pemberontakan PKI tentu tidak dapat terlepas dari adanya faktor politik, sehingga dalam penulisan skripsi ini pun memakai pendekatan politik. Pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan sebagainya.³⁴

Pendekatan agama merupakan suatu refleksi kritis dan sistematis yang dilakukan oleh penganut agama terhadap agamanya.³⁵ Dalam skripsi ini pendekatan agama sangat dibutuhkan, karena tema yang diangkat dalam skripsi ini adalah peranan sebuah organisasi kelaskaran yang bernafaskan Islam, yang

³³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 4.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kevin Barnet, *Pengantar Teologi*. Jakarta: Gunung Mulia, 1981, hlm. 15.

tentunya pembahasan tentang APS tidak akan bisa dilepaskan dari masalah keagamaan.

Pendekatan geografis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami kegunaan suatu ruang yang berhubungan dengan suatu peristiwa sejarah.³⁶ Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan geografis untuk mendefinisikan topografi Gunungkidul yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat Gunungkidul serta jalannya penumpasan gerakan PKI.

Pendekatan militer merupakan kebijakan mengenai persiapan dan pelaksanaan perang yang menentukan baik buruknya serta besar kecilnya potensi dan kekuatan negara, dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik suatu negara.³⁷ Penulis menggunakan pendekatan militer dalam skripsi ini dikarenakan salah satu objek dari penelitian ini adalah masalah pemberontakan PKI beserta penumpasannya. Sehingga sangat perlu kiranya pendekatan militer dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi yang berjudul “Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948.” ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab, dengan garis besar sebagai berikut:

³⁶ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 130.

³⁷ Sayadiman Suryohadiprojo, *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang : Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta: Intermasa, 1981, hlm. 66.

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan dari skripsi ini.

Bab kedua akan membahas mengenai Askar Perang Sabil (APS) Yogyakarta. Yang terdiri dari bagaimana sejarah terbentuknya APS, faktor pendorong terbentuknya, struktur organisasi dan keanggotaan APS, serta landasan perjuangan APS. Selain sejarah terbentuknya APS juga dibahas tentang pembinaan APS melalui pemantapan ideologi, pelatihan fisik dan militer serta pembinaan organisasi APS. Pada bagian terakhir bab ini akan dibahas mengenai dukungan-dukungan terhadap APS, baik itu dukungan dari pemerintah, dari TNI dan badan perjuangan lain, juga dukungan dari masyarakat.

Pada bab ketiga akan dibahas mengenai perkembangan PKI di Kabupaten Gunungkidul. Sebelum membahas tentang perkembangannya terlebih dahulu akan dibahas mengenai kondisi Gunungkidul pada masa awal kemerdekaan, yang berupa kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi politik pemerintahan baik di Gunungkidul maupun DIY secara umum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai politik PKI yang menjadikan Gunungkidul sebagai basis PKI di DIY, kebangkitan kembali PKI, politik PKI yang memanfaatkan kondisi masyarakat Gunungkidul, dan kaderisasi PKI di Gunungkidul. Dalam bab ini juga dibahas mengenai Peristiwa Madiun yang membawa dampak terhadap gerakan PKI di Gunungkidul.

Bab keempat akan membahas mengenai keterlibatan Askar Perang Sabil (APS) dalam operasi penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul

pada tahun 1948. Pada bab ini keterlibatan APS akan dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah kebijakan APS dalam menentang aksi PKI yang terdiri dari pertentangan APS dan PKI, serta usaha MU-APS mengobarkan semangat *jihad fii sabillillah* kepada pasukan APS maupun masyarakat muslim lainnya dalam melawan PKI, dan yang *kedua* adalah bergabungnya APS dengan TNI dalam menggagalkan rencana PKI menguasai Gunungkidul, sebagai perisai para pejuang, serta puncaknya pada saat penumpasan pemberontakan PKI. Sebagai penutup bab keempat ini akan dibahas mengenai peranan APS setelah berakhirnya pemberontakan PKI di Gunungkidul.

Pada bab kelima atau bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta isi dari semua pokok pembahasan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948.”

BAB II

ASKAR PERANG SABIL (APS) YOGYAKARTA

A. Terbentuknya APS

1. Faktor Pendorong Terbentuknya APS

Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Kepala Pemerintahan DIY selalu memberikan dukungan penuh terhadap usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Salah satu contoh adalah kebijakannya mengeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 12 Oktober 1945 yang berisi tentang ketentraman dan keamanan umum serta Maklumat No. 5 tertanggal 26 Oktober 1945 tentang pembentukan Laskar Rakyat di Yogyakarta untuk membantu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dalam mempertahankan kemerdekaan RI pada umumnya, serta DIY pada khususnya.¹ Atas dasar maklumat tersebut serta dukungan dari para ulama (tokoh Islam) yang sebelumnya telah aktif dalam usaha melawan penjajah, maka secara sukarela rakyat Yogyakarta berbondong-bondong bergabung dengan laskar-laskar perjuangan di daerahnya masing-masing.

Adapun beberapa organisasi kelaskaran yang lahir pada waktu itu antara lain, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) daerah “Mataram” yang bermarkas di Jalan Gondomanan² 13 Yogyakarta, yang pada perkembangannya berganti nama menjadi Tentara Rakyat Mataram (TRM).

¹ Tashadi, (dkk)., *Keterlibatan Ulama di DIY pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 19.

² Jalan Gondomanan sekarang diubah menjadi Jalan Brigjen Katamso.

Di daerah Bantul muncul beberapa badan kelaskaran yaitu Laskar Segoroyoso dan Laskar Tirtonirmolo, sedangkan di daerah Sleman tepatnya di Desa Brayut lahir Laskar Merah Putih. Di Kulonprogo, Adikarto, serta Wonosari Gunungkidul lahir laskar dengan nama salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal pada saat itu, yaitu Laskar Bambu Runcing.³

Dalam perkembangannya, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden RI mengeluarkan ketetapan tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyebabkan peleburan kelaskaran rakyat ke dalam tubuh TNI di bawah komando Panglima Besar Sudirman. Sejak saat itu secara resmi di Indonesia hanya ada satu wadah yang menampung seluruh kekuatan pejuang bersenjata, yaitu TNI. Diharapkan dengan hanya adanya satu wadah kekuatan bersenjata akan tercipta kekompakan dalam satu komando, sehingga lebih efektif dalam menandingi kekuatan musuh.⁴ Selanjutnya urusan pertahanan dan keamanan wilayah berada di tangan TNI dalam jajaran Divisi, Brigade, Resimen, dan Batalyon.

Pada tanggal 20 Juli - 4 Agustus 1947 Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia melancarkan serangannya ke beberapa wilayah di Indonesia yang dikenal dengan Agresi Militer I. Kejadian tersebut menimbulkan keprihatinan para ulama di Yogyakarta yang selanjutnya berinisiatif untuk kembali membentuk badan kelaskaran perang untuk mewadahi para mantan anggota Hizbullah, Sabillilah, serta umat muslim

³ *Ibid.*, hlm. 21-22.

⁴ Sardiman AM., *Panglima Besar Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000, hlm. 164.

Yogyakarta lainnya yang tidak masuk dalam TNI.⁵ Badan kelaskaran ini nantinya akan bertugas membantu TNI di dalam mempertahankan kemerdekaan RI.

Gagasan para ulama untuk kembali menghidupkan badan kelaskaran tersebut kemudian direalisasikan dengan diadakannya musyawarah yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo⁶ di Masjid Taqwa yang berada di Kampung Suronatan Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 1947 atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1367 H. Dalam pertemuan tersebut hadir para ulama ternama di Yogyakarta, antara lain K.R.H. Hadjid, K.H. Juraimi, K.H. Mahfudz Siradj, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Azis, K.H. Djohar, K.H. Amin, K.H. Daim, K.H. Ahmad Badawi, Bakri Syahid, Abdullah Mabur dan M. Sarbini.⁷ Mereka juga melakukan ibadah *I'tikaf* bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk. Berdasarkan musyawarah ini akhirnya diputuskan untuk membentuk badan kelaskaran di bawah pimpinan para ulama dengan nama Angkatan Perang Sabil (APS) dan wadah bagi organisasi

⁵ Abdur Rahman. "Laskar Angkatan Perang Sabil 1948-1949" dalam *Agama dan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1983, hlm. 10.

⁶ Ki Bagus Hadikusumo pada saat itu juga menjabat sebagai Ketua PP. Muhammadiyah. Selama Yogyakarta diduduki oleh Belanda dia tidak ikut meninggalkan kota untuk langsung bergerilya. Dia memilih tetap tinggal di tempat sebagai penghubung, dan yang terpenting adalah menjaga Kantor Pengurus Besar Muhammadiyah. Selain itu dia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Sultan Hamengkubuwono IX, sehingga tidak jarang di beberapa hal Sri Sultan meminta nasehat dari Ki Bagus. Djarnawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjoengan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Persatuan, 1979, hlm. 39.

⁷ Lihat lampiran 3, foto beberapa tokoh APS.

pemimpinnya disebut dengan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS).⁸

Kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi dari ulama serta umat Islam pada umumnya menjadi faktor pendorong terbentuknya APS. Kesadaran itu muncul karena mereka merasa mempunyai kewajiban untuk senantiasa membela negara disaat negara sedang menghadapi serangan dari Belanda. Lancarnya proses pembentukan laskar APS tersebut dikarenakan sejalan dengan adanya seruan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengharapkan segenap lapisan masyarakat untuk ikut mempertahankan negara pada tanggal 21 Juli 1947. Hubungan pribadi yang dekat antara para ulama dengan pihak Kraton Yogyakarta maupun Jenderal Sudirman selaku panglima TNI juga semakin memperlancar proses pembentukan APS.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan APS

Layaknya sebuah organisasi atau badan perjuangan pada umumnya, untuk mempermudah koordinasi dalam upaya mencapai cita-citanya, maka setelah terbentuknya APS-MUAPS musyawarah dilanjutkan untuk pembentukan pengurus pusat APS.⁹ Adapun hasil musyawarah tersebut menyepakati kepengurusan APS pusat terdiri dari:¹⁰

Penasehat	: Ki Bagus Hadikusumo
Imam	: K.H. Mahfudz Siradj

⁸ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 56.

⁹ Struktur organisasi MUAPS lihat lampiran 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

Ketua	: K.R.H. Hadjid
Wakil Ketua	: K.H. Ahmad Badawi
Bendahara	: K.H. Abdul Azis
Komandan	: M. Sarbini
Wakil komandan	: K.H. Juraimi
Penerangan	: Siradj Dahlan
Perlengkapan	: Abdul Djawab
Persenjataan	: M. Bakri Sudja
Logistik	: Bakri Syahid
Administrasi	: K.H. Daim

Setelah terbentuknya susunan kepengurusan APS pusat, maka pada pagi harinya tiga orang petinggi APS yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mahfudz Siradj, dan K.H. Ahmad Badawi menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Raja dan Kepala Daerah Yogyakarta, sekaligus Menteri Pertahanan untuk memohon do'a restu pembentukan Laskar Angkatan Perang Sabil seperti yang telah diputuskan sebelumnya.¹¹ Kebijakan ini dilakukan oleh para petinggi APS dikarenakan perlu adanya pengesahan dari Menteri Pertahanan serta instansi terkait agar APS menjadi badan perjuangan yang resmi. Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkenan memberikan do'a restunya, selanjutnya dia mengeluarkan keputusan yang

¹¹ Ahmad Adabi Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang, 2000, hlm. 67.

dikenal dengan *serat kekancingan*¹² bagi pengurus MU-APS. Maka selanjutnya diadakanlah upacara *bai'at* terhadap seluruh ulama dan pasukan APS di Masjid Agung Yogyakarta oleh K.H. Mahfudz Siradj selaku Imam Besar APS.¹³

Selain memberikan do'a restu, Sri Sultan juga memerintahkan agar para pimpinan APS menemui Panglima Besar Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI untuk menyampaikan surat dari Sri Sultan yang isinya agar mereka menyetujui berdirinya MUAPS-APS serta anjuran agar para pejabat militer serta sipil RI setempat menjaga hubungan baik dengan MUAPS-APS. Perintah tersebut dilaksanakan dengan mengirimkan beberapa ulama APS yang dipimpin oleh K.R.H. Hadjid menemui Jenderal Sudirman di Kampung Bintaran. Jenderal Sudirman dengan senang hati menyambut gagasan tersebut dan menyetujui untuk mengirimkan beberapa pasukannya sebagai pelatih militer pasukan APS, salah satunya adalah Bung Tomo.¹⁴ Setelah terbentuknya MUAPS-APS secara resmi maka segera dilakukan pelatihan kepada para anggotanya di halaman Masjid Besar Kauman dan di Alun-alun Utara Yogyakarta, dan selanjutnya segera dikirimkan utusan ke berbagai kabupaten di DIY untuk segera mengadakan pendaftaran calon anggota APS dan membentuk cabang APS di tiap-tiap kabupaten.

¹² *Serat kekancingan* adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai bentuk restunya kepada para ulama yang telah membentuk MUAPS-APS. Lihat lampiran 2.

¹³ Ahmad Adabi Darban, *loc.cit.* Foto Bung Tomo, lampiran 6 gambar 8.

¹⁴ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 131.

APS adalah organisasi kelaskaran yang dibentuk oleh para ulama Yogyakarta yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, sehingga APS bisa dikatakan sebagai organisasi kelaskaran bentukan Muhammadiyah.¹⁵ Nama Angkatan Perang Sabil pada perkembangannya diubah menjadi Askar Perang Sabil, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam bentuk kesatuan yang ada dalam TNI, karena di dalam menjalankan tugasnya APS selalu berada di bawah komando TNI.¹⁶ Kata *Askar* mempunyai persamaan makna dengan *Laskar* yang berarti pasukan atau tentara, hanya saja karena pada waktu itu lidah orang Jawa yang suka mencari kata yang lebih gampang diucapkan maka dipakailah kata *Askar*.¹⁷ Dalam kepengurusan MUAPS banyak diduduki oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya tergabung dalam Laskar Sabillillah sedangkan pasukan inti APS diisi oleh mantan-mantan tentara Hizbullah.

Jika dilihat dari latar belakangnya, maka kenggotan APS terdiri dari dua macam. *Pertama* adalah anggota APS yang berasal dari mantan-mantan anggota Sabillillah yang tidak masuk di dalam TNI, usia mereka rata-rata sudah lebih dari empat puluh tahun. Mereka adalah orang tua atau ulama, sehingga tugas utama mereka dalam APS adalah sebagai motor penggerak,

¹⁵ MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990, hlm. 211.

¹⁶ Abdur Rahman, *op.cit.*, hlm. 16.

¹⁷ Penggunaan kata *Askar* juga dimungkinkan dipakai sebagai ganti kata Angkatan untuk mempertahankan singkatan “APS” yang tadinya merupakan singkatan dari Angkatan Perang Sabil kemudian berganti dengan Askar Perang Sabil. Wawancara dengan Bapak Salim (85) di Munggur, Srimartani, Piyungan, Bantul pada tanggal 25 Maret 2012.

membina mental serta kemiliteran. *Kedua* adalah anggota APS yang sebelumnya merupakan mantan anggota Hizbullah yang juga tidak masuk dalam TNI ditambah dengan para pemuda Islam yang telah berusia tujuh belas tahun keatas. Mereka inilah yang selanjutnya menjadi pasukan utama APS.¹⁸

3. Landasan Perjuangan APS

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*¹⁹, yang berarti bahwa Islam bukan saja menciptakan kesatuan antara bangsa-bangsa dalam batas wilayah tertentu, melainkan sebuah kekuatan yang mempersatukan seluruh bangsa tanpa adanya batasan wilayah.²⁰ Di dalam agama Islam terdapat ajaran *jihad fii sabilillah, habbul wathon minal iman* serta *Amar ma'ruf nahi munkar*.²¹ Selain ketiga ajaran tersebut masih ada beberapa ajaran lain lagi yang pada intinya memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa mencintai serta berjuang membela tanah airnya dari segala macam kedholiman. Hal tersebut

¹⁸ Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1996, hlm. 5.

¹⁹ *Rahmatan lil'alam* mempunyai makna rahmat bagi seluruh alam, yang berarti Islam merupakan agama internasional, agama bagi seluruh umat manusia, di bawah prinsip-prinsip universalisme Islam yang berupa persamaan hak asasi manusia. M. Ramli, (dkk.), *Memahami Konsep Dasar Islam*. Semarang: UPT MKU UNNES, 2003, hlm. 42.

²⁰ *Ibid.*

²¹ "*Jihad fii sabilillah*" secara harfiah berarti "berperang di jalan Allah" dengan kata lain merupakan suatu bentuk perjuangan yang didasarkan atas tuntunan (jalan) yang diridhai oleh Allah. "*Habbul wathon minal iman*" mempunyai arti "cinta tanah air merupakan sebagian dari iman", sedangkan "*Amar ma'ruf nahi munkar*" berarti "mengajak kepada kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran (keburukan)". Tashadi, (dkk.), *op.cit.*, hlm. 28-29.

disadari betul oleh para ulama Islam (kyai) yang telah menjadikan ajaran Islam sebagai bagian dari hidupnya, sehingga dalam diri para kyai terbentuk jiwa dan semangat nasionalisme yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT.

Sebagai seorang tokoh yang terkemuka dalam masyarakat pada saat itu, para kyai senantiasa menanamkan ajaran cinta akan tanah air kepada masyarakat di sekitarnya. Berkat ajaran tersebut maka akan tercipta kader-kader pejuang yang dengan ketulusan hati sanggup berjuang dan mempertaruhkan jiwa raga demi tanah airnya. Kewajiban untuk berjihad sebagaimana yang terkandung dalam perintah *jihad fii sabilillah* itulah yang menjadi landasan kuat bagi perjuangan pasukan APS.

Ideologi untuk melaksanakan *jihad fii sabilillah* yang menjadi dasar perjuangan APS didasarkan pada firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ash Shaff ayat 10-12 dan An Nisa ayat 74 yang dengan tegas menjelaskan akan keutamaan berjihad di jalan Allah.²²

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di Jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosadosa-mu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga, “dan itulah keberuntungan yang besar”.²³

²² Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 29.

²³ Q.S. As Saff, ayat 10-12. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: As-Syifa', (t.t.), hlm. 1253-1254.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat²⁴, berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak Kami berikan kepadanya pahala yang besar.²⁵

Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah SWT menganjurkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan jihad di jalan Allah dan Allah menjanjikan balasan yang berupa surga bagi mereka yang menjalankan perintah tersebut. Bagi para ulama perintah tersebut telah menjadi ideologi hidup mereka. Ideologi tersebut kemudian ditanamkan pada diri seluruh pasukan APS, dengan demikian maka para ulama dapat dengan mudah menggerakkan pasukannya untuk berjuang di berbagai medan pertempuran.

Selain kedua ayat di atas di dalam Islam juga terdapat ajaran untuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan juga keridhaan Allah untuk memerangi penjajah. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggalan firman Allah Surat Ali Imran ayat 110 dan surat Al Hajj ayat 39.

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.....”²⁶

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karna sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu’.”²⁷

Dari kedua ayat di atas jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berjuang menegakkan kebaikan di muka

²⁴ Orang-orang mukmin yang mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia ini.

²⁵ Q.S. An Nisa, ayat 74. *Ibid.*, hlm. 190.

²⁶ Q.S. Ali Imran, ayat 110. *Ibid.*, hlm. 135.

²⁷ Q.S. Al Hajj, ayat 39. *Ibid.*, hlm. 732.

bumi dengan *beramar ma'ruf nahi munkar* serta mengizinkan manusia untuk memerangi orang-orang yang sebelumnya telah memerangi terlebih dahulu (penjajah). Kedua ayat tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi APS untuk memerangi penjajah serta kelompok-kelompok lain yang berusaha untuk menghancurkan bangsa Indonesia.

Selain firman-firman Allah tersebut, para ulama juga berusaha untuk semakin mengokohkan mental dan keimanan anggota pasukan APS dengan cara penggunaan simbol-simbol dalam atribut mereka, misalnya adalah penggunaan lafadz Syahadat "*Laa Illaha Illallah Muhammadarrosulullah*" yang artinya "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah", yang dituliskan pada bendera dan ikat kepala pasukan APS ketika terjun di medan pertempuran.²⁸ Selanjutnya untuk mendorong dan membakar semangat juangnya, pasukan APS senantiasa meneriakkan lafadz takbir "*Allahu Akbar*" yang artinya "Allah Maha Besar" dalam setiap gerak juangnya.

B. Pembinaan APS

1. Pemantapan Ideologi

Para ulama senantiasa menyerukan semangat *jihad fii sabilillah* sebagai ideologi umat muslim dalam menghadapi penjajah, baik kepada mereka yang telah tergabung dalam pasukan APS maupun kepada masyarakat umum. Bahkan bukan hanya oleh para ulama, pembinaan ideologi dan

²⁸ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 28. Lihat lampiran 8 gambar 16, bendera APS dengan gambar bulan bintang di atas lafadz kalimat syahadat.

kesadaran untuk senantiasa berjuang di jalan Allah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI juga diserukan dan dicontohkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, panglima tertinggi TNI yang sekaligus salah seorang kader Muhammadiyah. Dia adalah sosok jenderal saleh yang senantiasa memanfaatkan setiap momentum yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini sebagai wujud dari pelaksanaan jihad, sehingga dia selalu meyakinkan dirinya sendiri serta pasukannya bahwa orang-orang yang berjuang, membela kebenaran, membela tanah airnya, digambarkan sebagai sebuah jihad, bagi mereka yang gugur dalam jihad tersebut tidak ada balasan lain bagi mereka selain surga Allah.²⁹ Dalam usaha menyebarluaskan semangat jihad di kalangan angkatan bersenjata dan seluruh rakyat Indonesia, melalui bagian penerangan tentara Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyebar pamflet atau selebaran yang berisi ajakan untuk berjihad bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh selebaran itu antara lain;

Insjafilah!

Barang siapa mati, pada hal (sewaktoe hidoepnja) beloem pernah toeroet berperang (membela keadilan) bahkan hatinja berhasrat perang poen tidak, maka matilah dia diatas tjabang kemoenafikan.

(Hadis Nabi Moehamad s.a.w.)

0585 M Pertahanan Rakjat Indonesia³⁰

Berkat seruan dari Jenderal Sudirman serta ulama pada umumnya ternyata mampu menanamkan dan memperkuat jiwa *jihad fii sabilillah* dalam

²⁹ Sardiman AM., *op.cit.*, hlm. 203.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

diri pemuda-pemuda Islam pada waktu itu, maka mulailah berdatangan pemuda-pemuda dari berbagai daerah untuk mendaftarkan diri sebagai anggota pasukan APS. Mereka menyatakan siap untuk diberangkatkan ke beberapa medan pertempuran sebagai sukarelawan anggota pasukan APS. Untuk memberikan kesempatan kepada mereka, maka MUAPS mengatur pengiriman mereka ke garis depan pertempuran secara bergiliran kurang lebih selama dua minggu.³¹

Semangat *jihad fii sabilillah* yang ada pada diri pasukan APS tersebut perlu untuk senantiasa dibina secara terus-menerus, hal ini dimaksudkan agar semangat tersebut tidak luntur. Hal ini disadari betul oleh para ulama selaku pimpinan dalam APS, apalagi mereka juga menyadari bahwa mereka tidak pernah tahu kapan perjuangan APS dalam menghadapi musuh-musuh yang mengancam RI tersebut akan berakhir, sehingga bukan hal yang mustahil apabila suatu saat semangat jihad tersebut hilang dari diri pasukan APS. Menghadapi kekhawatiran tersebut, maka sejak berdirinya APS para ulama selalu memberikan dorongan serta motivasi kepada pasukannya. Mereka selalu menyerukan ideologi *jihad fii sabilillah* kepada para pejuang APS. Bukan hanya di dalam masjid dan pesantren-pesantren tempat tinggal para ulama, tetapi juga dalam pengajian-pengajian di tempat terbuka.

Para ulama biasanya menanamkan ideologi *jihad fii sabilillah* tersebut melalui ceramah yang mampu mengobarkan semangat juang pasukan APS maupun sekedar melalui cerita-cerita perang pada masa Rasulullah. Melalui

³¹ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 50.

kisah-kisah perang seperti Perang Badr, Uhud, Tabuk, dan lainnya diharapkan akan mampu diambil hikmahnya oleh pasukan APS, selanjutnya mampu membangkitkan semangat juang dalam menghadapi penjajah.³² Usaha penanaman serta pemantapan ideologi *jihad fii sabilillah* bagi para pasukan APS bisa dinilai sangat berhasil. Hal tersebut nantinya dapat dilihat bagaimana semangat yang membara dari pasukan APS ketika telah terjun di medan pertempuran.

Untuk memberikan dorongan mental yang lebih besar kepada pasukan APS, para ulama juga terlibat langsung di setiap kancah pertempuran bersenjata, hal tersebut memang merupakan sunnah para sahabat Nabi dan para ulama zaman Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar dan sebagainya. Kehadiran ulama dalam setiap pertempuran pasukan APS memang sangat diperlukan, tidak hanya untuk membimbing upacara ibadah dan mengurus pasukan yang tewas, yang lebih penting adalah untuk memelihara ketebalan mental dan mengobarkan semangat *jihad fii sabilillah* di dalam mempertahankan tanah air dan kedaulatan negara serta membela kebenaran.³³

2. Pelatihan Fisik dan Militer

Setelah terbentuknya APS, sesuai dengan kesanggupan dari Jenderal Sudirman untuk mengirimkan beberapa pasukannya dengan tujuan memberikan pelatihan dan pembinaan militer kepada pasukan APS,

³² Wawancara dengan Bapak Salim di Piyungan, Bantul pada tanggal 25 Maret 2012.

³³ Djarnawi Hadikusumo, *op.cit.*, hlm. 37-38.

diantaranya adalah Soetomo (Bung Tomo) dan Mayor Fachruddin, maka pelatihan tersebut segera dilaksanakan.³⁴ Selain dari TNI, pasukan APS juga mendapatkan pelatihan fisik dan militer dari para sukarelawan mantan anggota Hizbullah. Awal mulanya latihan dipusatkan di halaman Masjid Besar Kauman dan Alun-alun Utara Yogyakarta.³⁵ Pada perkembangannya pelatihan fisik dan militer diadakan di setiap kepanewonan (kecamatan) sebelum mereka diberangkatkan ke medan pertempuran.³⁶ Latihan fisik dan militer ini tentunya menjadi kewajiban yang harus dijalani oleh setiap pasukan APS, hal ini dikarenakan sebagai sebuah badan kelaskaran yang akan diterjunkan dalam medan juang, mereka harus siap dan mampu untuk menghadapi segala macam gangguan yang berasal dari pihak musuh.

Dalam pelatihan militer ini, banyak materi-materi yang diberikan kepada pasukan APS. Yang pertama kali diberikan adalah latihan baris-berbaris, hal ini dimaksudkan agar di dalam pasukan APS akan tertanam jiwa disiplin, teratur, dan kompak ketika sewaktu-waktu harus berhadapan langsung dengan musuh. Selanjutnya diajarkan juga latihan dasar-dasar kemiliteran seperti bagaimana cara menggunakan senjata, menghemat tenaga dan peluru, serta taktik dalam melakukan serangan yang penuh dengan perhitungan. Salah satu materi pokok yang diberikan kepada pasukan APS

³⁴ Ahmad Adabi Darban, "Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS)". *Istoria*, Vol. 3 No. 1, September 2007, hlm. 12.

³⁵ Lihat lampiran 8 gambar 10 dan 11. Gambar Masjid Agung Yogyakarta dan Alun-alun Utara Yogyakarta.

³⁶ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 41.

adalah taktik bergerilya. Hal ini diberikan mengingat lawan yang dihadapi jauh lebih kuat terutama dari segi persenjataan, sehingga tidak mungkin ketika harus menghadapi Belanda dalam pertempuran terbuka. Adanya pelatihan taktik dan strategi perang gerilya ini diharapkan pasukan APS akan mampu bertempur sesuai dengan situasi dan kondisi, mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus kembali bersembunyi.³⁷

Pelatihan fisik dan militer ini selanjutnya dipusatkan di berbagai tempat sesuai dengan materi yang sedang diberikan kepada pasukan APS. Latihan fisik dan baris-berbaris tetap diselenggarakan di Kota Yogyakarta, yaitu di halaman Masjid Agung Yogyakarta, latihan penggunaan senjata di Sendowo, dan latihan perang di Tegalrejo, Sekip, dan pantai selatan.³⁸ Akibat serangan Belanda ke Kota Yogyakarta, maka latihan-latihan tersebut selanjutnya dipusatkan di daerah kabupaten masing-masing.³⁹

3. Pembinaan Organisasi

Setelah terbentuknya wadah bagi para pimpinan APS yang dikenal dengan MU-APS maka jelas kiranya bahwa APS bukan hanya sekedar sekumpulan orang yang siap berperang di medan pertempuran, namun lebih dari itu. APS dan khususnya MU-APS merupakan sebuah kelaskaran yang terorganisir dengan baik. Sebagaimana yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, terdapat susunan kepengurusan yang jelas di dalam APS.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁸ Ahmad Adabi Darban, *op.cit.*, hlm. 68.

³⁹ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 41.

Masing-masing anggota memiliki tugas dan perannya masing-masing. Organisasi dalam APS ini dibentuk dengan tujuan mempermudah koordinasi dalam tubuh APS demi tercapainya tujuan APS yaitu berjihad untuk membela tanah air dan menegakkan kebenaran. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berangkat ke medan juang dengan barisan yang tersusun rapi bagaikan bangunan yang kokoh”.⁴⁰

Dari ayat 4 surat As-Shaff tersebut jelas bahwasannya Allah menginginkan adanya kekompakan dan kerapian bagi mereka yang akan berangkat berperang di jalan Allah. Ayat tersebut juga menggambarkan perlunya sebuah organisasi dalam sebuah kesatuan, dengan adanya organisasi akan tercipta suatu gerakan yang rapi dan kokoh. Selanjutnya dalam usaha mencapai tujuannya, sebuah organisasi perlu memiliki seorang pemimpin yang tangguh, yang mampu mengambil keputusan dan mampu mengorganisir dengan baik organisasi yang dia pimpin. Untuk itu setiap pemimpin dalam suatu organisasi perlu kiranya mengetahui tugas-tugas pokoknya secara jelas, memahami wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya tersebut.⁴¹

Pimpinan tertinggi di dalam MUAPS adalah seorang ulama yang dikenal dengan sebutan imam. Namun di dalam setiap tindakannya, seorang imam tidak dapat lepas dari seorang penasehat. Seorang imam APS memiliki

⁴⁰ Q.S. As Saff, ayat 4. Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 1251.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 33.

tanggungjawab atas keseluruhan gerak langkah APS. Dalam bidang militer imam mempunyai tanggungjawab untuk melakukan rekrutmen anggota, memilih komandan pertempuran dan menyediakan segala keperluan perang, selain itu juga bertanggungjawab atas hubungan pasukan APS dengan pihak-pihak luar seperti TNI dan masyarakat umum. Dalam bidang keagamaan imam memiliki tanggungjawab untuk selalu menjaga perilaku pasukan APS dimanapun mereka berada.⁴² Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, imam dibantu oleh staf-staf terkait.

APS adalah badan kelaskaran yang memiliki tujuan untuk berperang melawan penjajah. Sehingga berperang merupakan tugas wajib bagi pasukan APS. Untuk keberhasilan di dalam setiap pertempuran yang melibatkan APS, tentu diperlukan sosok pemimpin dalam setiap rencana pertempuran. Sehingga di dalam susunan kepengurusan MUAPS ada sebuah jabatan yang namanya komandan pertempuran, yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pertempuran. Komandan pertempuran dipilih oleh imam dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ketua dan diantara keduanya memiliki garis komando sejajar sehingga diantara mereka harus mampu untuk menjalin kerjasama dan koordinasi agar tercipta suatu hubungan yang harmonis antar struktur dalam sebuah organisasi.⁴³ Sama halnya dengan imam, dalam menjalankan tugas-tugasnya komandan pertempuran dibantu

⁴² Suratmin, *op.cit.*, hlm. 45.

⁴³ Hadari Nawawi, *op.cit.*, hlm. 31.

oleh staf-staf lainnya seperti wakil ketua, sekretaris, bendahara, staf perlengkapan, persenjataan, penerangan, administrasi, dan logistik.⁴⁴

C. Dukungan terhadap APS

1. Dukungan dari Pemerintah

Kedatangan kembali Belanda ke Indonesia dilengkapi dengan Agresi Militernya membuat kondisi pemerintahan RI yang belum lama berdiri menjadi kacau. Belanda banyak melakukan provokasi yang dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi kondisi yang demikian, maka mulai awal tahun 1946 pemerintah mengambil kebijakan untuk berunding dengan pihak Belanda, padahal pada saat itu tentara sedang dalam kondisi bersemangat dalam menghadapi serangan-serangan Belanda. Menyikapi kebijakan pemerintah yang mulai berkembang ke arah diplomasi tersebut, Jenderal Sudirman selaku Panglima TRI (Tentara Republik Indonesia) pada waktu itu, berpendirian bahwasannya perang juga tetap dibutuhkan dalam usaha mencapai kemerdekaan secara penuh, dengan menunjukkan bahwasanya Indonesia masih mempunyai tentara yang kuat maka lawan berunding tidak akan berani untuk memaksakan kehendaknya.⁴⁵

Sejak saat itu terjadilah perbedaan pandangan antara pemerintah dengan tentara, khususnya antara Presiden Sukarno dan Jenderal Sudirman

⁴⁴ Lihat susunan kepengurusan APS dalam, Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 57.

⁴⁵ Sardiman, *op.cit.*, hlm. 158.

dalam usaha memerdekakan Indonesia secara penuh. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajak Kolonel A.H. Nasution untuk mengajukan pemberhentian dari jabatan dan keluar dari dinas ketentaraan kepada panglima tertinggi (Presiden Sukarno) sebagai akibat dari permintaan pemerintah agar tentara mengakhiri perang gerilya. Namun rencana tersebut tidak jadi dilakukan dan mereka memilih untuk tetap loyal terhadap pemerintah.⁴⁶ Jenderal Sudirman memahami bahwa diplomasi juga perlu dilakukan, tetapi perlu keterpaduan antara sipil dan militer, sehingga terjadi sinergi untuk menentukan satu irama perjuangan.⁴⁷ Namun pada kenyataannya hasil perundingan-perundingan yang dilakukan antara RI-Belanda justru lebih banyak merugikan pihak RI. Hal tersebut semakin membuat Jenderal Sudirman kecewa dengan sikap pemerintah. Akhirnya ketika pemerintah sedang sibuk dalam upaya melakukan diplomasi, Jenderal Sudirman bersama pasukannya tetap berjuang menghadapi Belanda.

Melihat kondisi pemerintahan yang seperti itu wajar kiranya jika pemerintah kurang memberikan dukungan terhadap badan-badan kelaskaran yang berdiri pada waktu itu, termasuk terhadap APS tentunya. Satu-satunya dukungan nyata yang diberikan pemerintah atas berdirinya APS adalah dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku kepala daerah DIY. Meskipun bukan dari pemerintah pusat, dukungannya terhadap berdirinya

⁴⁶ Cholisin, *Militer dan Gerakan Prodemokrasi: studi analisis tentang respons militer terhadap gerakan prodemokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002, hlm. 30.

⁴⁷ Sardiman, *op.cit.*, hlm. 163.

APS tetap menjadi kekuatan tersendiri bagi pasukan APS. Walau bagaimanapun Sri Sultan tetaplah sosok yang paling disegani bagi masyarakat Yogyakarta pada waktu itu, meskipun kondisi secara birokrasi telah berbeda, namun dia tetaplah seorang raja bagi rakyat Yogyakarta. konsep *sabda pandhita ratu*⁴⁸ tetap berlaku bagi masyarakat Yogyakarta.

Meskipun terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan militer, namun disadari atau tidak, tetap terjadi kerjasama diantara dua lembaga tersebut dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI. Karena walau bagaimanapun keberhasilan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya tidak lepas dari kedua kebijakan tersebut, diplomasi yang disertai perlawanan secara militer. Jika hanya mengandalkan perjuangan melalui diplomasi sebagaimana yang diinginkan pemerintah, tidak mungkin terjadi Serangan Umum 1 Maret yang mampu membuka mata dunia khususnya PBB. Mereka menjadi tahu bahwasannya RI dan tentaranya masih tetap eksis. Begitupula sebaliknya, tanpa melalui jalur diplomasi perang antara pasukan Belanda dan rakyat Indonesia masih akan terus berlanjut. Hal itu tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia yang penuh keterbatasan dalam bidang militer.

⁴⁸ Konsep *sabda pandhita ratu* adalah sebuah konsep atau gagasan yang menyamakan seorang raja atau ratu layaknya seorang pendeta (orang suci pilihan Tuhan), sehingga apa yang menjadi sabda atau keputusan apapun yang diberikan oleh seorang ratu atau raja sama dengan sebuah sabda yang diberikan oleh seorang pendeta yang selalu mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa.

2. Dukungan dari TNI dan Badan Perjuangan Lain

Sebelum secara resmi berdiri, para ulama pemimpin APS terlebih dahulu menghadap Sultan Hamengkubuwono IX selaku Menteri Pertahanan RI dan juga Panglima Besar Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI guna mohon do'a restu untuk berdirinya APS yang ditujukan untuk membantu TNI dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI. Baik Sri Sultan maupun Jenderal Sudirman ternyata menyetujui permohonan para ulama tersebut, bahkan sanggup untuk mengirimkan beberapa orang pasukannya untuk memberikan pelatihan militer dan bantuan persenjataan kepada pasukan APS. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya, APS telah mendapatkan dukungan penuh dari pihak militer.

Dalam perkembangannya, antara TNI dan APS dapat bahu-membahu dalam setiap pertempuran yang melibatkan dua badan perjuangan tersebut. Karena pasukan APS sifatnya merupakan pasukan pembantu TNI, maka setiap gerakan yang dilakukannya atas persetujuan dari pihak TNI terlebih dahulu. Selain bahu-membahu di medan pertempuran, mereka juga bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Meskipun secara taktis, organisatoris dan administratif pasukan APS berada di bawah TNI, namun diantara keduanya dapat bekerjasama dengan baik tanpa merendahkan salah satu pihak.⁴⁹

Selain dari TNI, pasukan APS juga mendapatkan dukungan dari badan perjuangan lain yang ada pada saat itu, misalnya dari Barisan Berani Mati,

⁴⁹ Abdur Rahman, *op.cit.*, hlm. 10.

Hantu Maut, BPRI, dan lain-lain. Hampir sama dengan yang diberikan oleh TNI, bentuk dukungan yang diberikan oleh badan-badan kelaskaran tersebut berupa kerjasama bahu membahu dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Sedangkan dukungan terhadap pasukan APS dari badan kelaskaran besar yang pernah ada di Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang yaitu Hizbullah dan Sabillilah tampak nyata dengan terlibatnya tokoh-tokoh kedua badan kelaskaran tersebut di dalam pendirian MUAPS dan APS.

Pada masa revolusi fisik tersebut sangat jelas terjalin suatu bentuk kerjasama antar lapisan masyarakat termasuk antar badan perjuangan, baik di medan pertempuran maupun di garis belakang. Sebagai sesama pejuang mereka dituntut untuk saling bekerjasama disertai rasa toleransi yang tinggi tanpa membedakan ras.⁵⁰ Kondisi berbeda dialami oleh pasukan APS ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, yaitu saat mereka dikirim ke Kebumen. Atas perintah dari Jenderal Sudirman dan saran dari Sri Sultan, pasukan APS diminta untuk digabungkan dengan AOI (Angkatan Oemat Islam)⁵¹ dalam

⁵⁰ Tashadi, *op.cit.*, hlm. 77.

⁵¹ AOI (Angkatan Oemat Islam) didirikan pada bulan Oktober 1945 di Kebumen oleh Machfuds Abdurrahman (Romo Pusat). Sejak awal perang kemerdekaan AOI dikenal teguh memegang prinsip untuk terus berperang melawan Belanda. Setelah berlangsungnya KMB (Konferensi Meja Bundar) maka secara resmi RI menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat). Maka pemerintah memerintahkan kepada AOI untuk digabungkan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), namun perintah tersebut ditolak oleh AOI. Pada dasarnya AOI tidak mengenal kerjasama dalam bentuk apapun dengan Belanda. Karena RIS merupakan hasil kerjasama Indonesia-Belanda, maka AOI tetap kukuh untuk terus berperang melawan pasukan Belanda yang ada di Indonesia. Darto Harnoko dan Poliman, *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, hlm. 47-54.

menghadapi Belanda. Setelah diadakan perundingan antara K.H. Mahfudz Siradj dan pimpinan AOI Khoraisin Mahfudz, ternyata Khorisin Mahfudz tidak setuju jika pasukannya digabungkan dalam satu wadah dengan pasukan APS. Oleh karena itu, K.H. Mahfudz Siradj membuat garis perjuangan sendiri dengan mengerahkan pasukan bersenjata APS.⁵²

3. Dukungan dari Masyarakat

Mayoritas masyarakat Indonesia dan DIY pada khususnya adalah pemeluk agama Islam (muslim), sehingga wajar apabila mereka begitu mendukung keberadaan APS sebagai organisasi kelaskaran bernafaskan Islam dan lahir di tengah-tengah mereka. Dukungan terhadap pasukan APS dari masyarakat bukan hanya dari segi moral saja, namun juga dalam bentuk materi yang berupa logistik. Sebagai sebuah organisasi kelaskaran yang mandiri (tanpa bantuan pemerintah sipil) dari segi kebutuhannya, keberlangsungan APS sangat tergantung terhadap dukungan dari beberapa ulama dan masyarakat. Kebutuhan logistik tersebut bukan hanya ketika pasukan APS terjun di medan perang saja, tetapi juga saat mereka melaksanakan latihan.

Wujud dukungan nyata masyarakat terhadap APS adalah dengan pembukaan dapur umum di tempat-tempat yang dijadikan markas oleh pasukan APS, baik ketika melakukan latihan maupun bertempur. Dibukanya dapur umum untuk pasukan APS memudahkan masyarakat untuk memberikan bantuan yang berupa bahan makanan seperti beras, kelapa,

⁵² *Ibid.*, hlm. 62-64.

singkong, dan lain-lain. Bagi masyarakat yang mampu (dari segi ekonomi) mereka memberikan bantuan berupa uang, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, mereka menyumbangkan tenaganya untuk bekerja di dapur umum membantu pasukan APS yang sedang ditugaskan di dapur. Dalam usaha memenuhi kebutuhan logistik ini tidak dapat dikesampingkan peranan para ulama. Karena merekalah yang menghimpun dana dan keperluan lainnya dari para donatur dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk.

Pada masa perang kemerdekaan dapur umum memang memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberlangsungan perjuangan bangsa Indonesia, baik itu bagi TNI maupun organisasi-organisasi kelaskaran termasuk APS. Dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta, Pasukan Siliwangi yang sempat didatangkan dari Jawa Barat untuk membantu TNI dengan jumlah personil sekitar empat ratus orang sempat singgah di Wates. Selama di Wates kebutuhan mereka yang berupa makan, minum, dan keperluan logistik lainnya ditanggung dapur umum yang didirikan oleh Haji Salamudin dan masyarakat Wates. Dapur umum tersebut juga merupakan milik pasukan APS, karena Haji Salamudin sendiri merupakan Komandan Kompi pasukan APS yang mengurus masalah logistik.⁵³

Selain dari perorangan, bantuan untuk pasukan APS juga datang dari beberapa perusahaan swasta tempat dimana pasukan APS sedang berjuang. Sebagai contoh adalah bantuan yang diberikan oleh Pabrik Gula Gesikan di Bantul. Mereka mempersilahkan pabriknya sebagai asrama bagi pasukan APS. Pasukan APS juga mendapatkan bantuan berupa beras dan gula pasir

⁵³ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 81.

masing-masing seberat satu kwintal setiap bulannya. Bantuan yang berupa kurang lebih 100 ton beras, 50 ton kedelai, dan 225 ton tauco juga diberikan oleh Laskar Banyuwangi.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

BAB III

GERAKAN PKI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Kondisi Gunungkidul pada Masa Awal Kemerdekaan

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Gunungkidul terletak di antara $110^{\circ}21'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dan antara $7^{\circ}46'$ - $8^{\circ}09'$ Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis Kabupaten Gunungkidul memiliki batas-batas sebagai berikut; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman (Propinsi DIY), sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Propinsi Jawa Tengah), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah), dan di sebelah selatan Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.¹

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi DIY, dengan Ibukotanya Wonosari. Sebelum menjadi bagian dari wilayah DIY, Gunungkidul dahulunya merupakan wilayah dari Kerajaan Surakarta. Adanya perjanjian antara raja Surakarta dan raja Yogyakarta yang diprakarsai oleh pihak Belanda pada tanggal 27 September 1830 di Klaten, yang membahas mengenai pemisahan batas dan pembagian kembali wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut Kerajaan Surakarta hanya memiliki daerah Pajang dan Sukawati, sedangkan Kerajaan

¹ Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Gunungkidul dalam Angka*. Gunungkidul: Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, 1983, hlm. 2.

Yogyakarta memperoleh daerah Mataram dan Gunungkidul.² Maka sejak saat itulah Gunungkidul menjadi bagian dari Kasultanan Yogyakarta.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan bervariasi, 18,19% diantaranya merupakan daerah datar dengan tingkat kemiringan 0°-2°, sedangkan daerah dengan tingkat kemiringan antara 15°-40° sebesar 39,54% dan untuk kemiringan lebih dari 40° sebesar 15,95%.³ Berdasarkan topografi, jenis batuan, jenis tanah, ketinggian, dan keadaan hidrologi atau sumber air, wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi tiga zona wilayah sebagai berikut:

- a). Zona utara atau zona Batur Agung, meliputi wilayah Kecamatan Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
- b). Zona tengah atau zona Ledok Wonosari atau Cekungan Wonosari, meliputi wilayah Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong Tengah, dan Semanu bagian utara.
- c). Zona selatan atau zona Gunung Seribu, meliputi wilayah Kecamatan Panggang, Paliyan, Tepus, Rongkop, Semanu Selatan dan Ponjong Selatan.⁴

Berdasarkan letak daerahnya yang masuk ke dalam kawasan pegunungan seribu yang dikenal sebagai pegunungan karst atau kapur, tanah di Gunungkidul sebagian besar adalah tanah tandus. Sementara sebagian

² Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hlm. 119-120.

³ Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul, *loc.cit.*

⁴ *Ibid.* hlm. 2-3.

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani,⁵ padahal dengan kondisi tanah yang kering serta berbukit-bukit tersebut mereka hanya mampu menanam padi satu kali dalam setahun, yaitu ketika musim hujan tiba, sehingga lahan pertanian di Gunungkidul ini dikenal sebagai *tanah tadah hujan*,⁶ dengan demikian wajar apabila penduduk di Gunungkidul (terutama zona selatan) dari dulu dikenal sebagai penduduk miskin.

Selain kesuburan tanah, air merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap hasil pertanian.⁷ Mengingat tidak adanya irigasi sebagai sarana pendukung dalam pertanian, tanah pertanian di Gunungkidul sangat tergantung pada curah hujan, sehingga padi hanya dapat ditanam pada musim penghujan. Setelah padi dipanen, sebelum datangnya musim kemarau petani menanam palawija seperti kacang-kacangan, sedangkan pada musim kemarau tanah di daerah ini disebut *tanah lemarengan*⁸ yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

⁵ Bahkan hingga tahun 2006 pertanian masih merupakan mata pencaharian utama bagi lebih dari 70% warga Gunungkidul. Astuti Rahayu. "Kabupaten Gunungkidul: Sebuah Kajian Wilayah yang Kurang Berkembang". *Tesis*, Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 46.

⁶ *Tanah tadah hujan* adalah tipe tanah yang sangat mudah menyerap air. Tanah seperti ini hanya bisa ditanami padi pada waktu musim penghujan saja, sedangkan pada musim kemarau biasanya dimanfaatkan untuk ditanami palawija.

⁷ Menurut Clifford Geertz, air (pengaturan air) lebih penting daripada tipe tanah dalam penanaman padi, Clifford Geertz. "Agriculture Involution", a.b. S. Supomo, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1976, hlm. 30-31.

⁸ *Tanah lemarengan* merupakan sebutan terhadap tanah tadah hujan di daerah Gunungkidul pada musim kemarau.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian masyarakat Gunungkidul pada masa awal kemerdekaan dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perekonomian di DIY secara umum. DIY sebagai Ibukota RI pada saat itu tentu saja menjadi sasaran utama Belanda untuk melakukan aksi blokade ekonominya. Belanda berusaha untuk menutup jalur-jalur ekonomi DIY yang selama ini menghidupinya. Keadaan ini juga diperparah dengan semakin banyaknya jumlah penduduk Yogyakarta sebagai akibat kedatangan pengungsi-pengungsi yang berasal dari daerah lain.⁹ Kas negara kosong, bahkan untuk menggaji pegawai seluruh kantor dan instansi pemerintah RI, Sri Sultan mengeluarkan uang pribadinya dari kas kraton.¹⁰

Kondisi perekonomian DIY pada masa awal kemerdekaan ini sangat buruk, bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan masa sebelum kemerdekaan. Hal ini sekali lagi dipengaruhi oleh politik Belanda yang melakukan blokade ekonomi terhadap Yogyakarta. Sebagai akibatnya, harga barang-barang kebutuhan pokok setiap hari semakin bertambah mahal. Banyak terjadi kelaparan di berbagai tempat, sehingga masyarakat terpaksa

⁹ Suratmin, (dkk.), *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hlm. 343.

¹⁰ Ahmad Adabi Darban, (dkk)., *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998, hlm. 40-41.

mengonsumsi daun-daunan serta buah-buahan mentah untuk sekedar mengisi perut.¹¹

Kondisi yang demikian menimbulkan suasana yang tidak tenteram, hal ini disebabkan munculnya berbagai macam tindakan kriminal di dalam masyarakat. Banyak terjadi perampokan-perampokan terhadap rumah-rumah penduduk yang telah kosong karena ditinggal pemiliknya mengungsi, bahkan tidak jarang, mereka juga merampok rumah-rumah penduduk yang masih berpenghuni. Mereka melakukan tindakan kriminal ini dengan berbagai macam motif, ada yang melakukannya disebabkan desakan ekonomi, namun ada juga mereka yang memang berprofesi sebagai perampok. Selain kedua alasan tersebut, tidak jarang pula perampokan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab ini dikarenakan sebuah taktik dari Belanda untuk memperlemah kedudukan RI.¹²

Situasi umum perekonomian di Indonesia pada zaman revolusi bersenjata melawan Belanda sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa produksi dan impor berbagai komoditi terhenti atau terhambat, sedangkan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah selama perang dan revolusi menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat. Jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan keuangan defisit (deficit financing policy) yang telah lama berjalan. Uang kertas membanjiri seluruh

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ranto Suwito di Rongkop, Gunungkidul pada tanggal 12 Februari 2012.

¹² Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 415.

negeri dan harga-harga membumbung tinggi, sementara barang-barang dan jasa jumlahnya menurun.¹³

Kondisi yang sama juga berlaku bagi beberapa kabupaten di DIY, misalnya di sebagian besar daerah Sleman, Bantul, dan Kulonprogo, ekonomi rakyat sungguh memprihatinkan. Selain dipengaruhi oleh inflasi yang membumbung tinggi, kurang maksimalnya hasil pertanian khususnya padi sebagai bahan makanan pokok menjadi penyebabnya. Kondisi sedikit berbeda justru dialami oleh masyarakat di Gunungkidul, kebiasaan mereka mengkonsumsi ubi kayu (ketela) ternyata meringankan beban mereka saat beras sulit didapat. Hal ini juga didukung dengan hasil pertanian ubi kayu yang tetap stabil.

Produksi ubi kayu di Gunungkidul saat itu bahkan bisa dikatakan cukup baik. Hasil rata-rata ubi kayu per hektar adalah 36,74 kwintal tiap tahun. Biaya produksi bisa diabaikan karena penanaman ubi tidak begitu padat karya dibandingkan dengan padi, bibit yang dipakai juga diambil dari batang yang tidak dapat dimakan, sehingga hal ini tentu saja semakin menekan biaya produksi. Jika pada waktu itu dianggap bahwa tanah milik perorangan rata-rata adalah $\frac{1}{2}$ hektar, maka pada waktu keadaan normal satu keluarga bisa memperoleh $\frac{1}{2} \times 36,74 = 18,37$ kwintal ubi tiap tahun. Ubi

¹³ Selo Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*. a.b. H.J. Koesoemanto. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 188.

harus disimpan setelah dikeringkan dan beratnya akan berkurang 25%, sehingga yang tersisa sekitar 14 kwintal.¹⁴

Namun dengan kondisi daerah yang berbatu-batu serta tanah yang kurang subur, bisa dikatakan bahwa pada saat itu tidak ada sumber pendapatan lain bagi masyarakat Gunungkidul selain yang bersumber dari hasil ubi tersebut. Padahal mereka juga membutuhkan kebutuhan hidup yang lain, sementara harga barang-barang juga melambung tinggi, sehingga mereka harus menjual hasil ubi kayu hasil pertanian mereka dengan harga yang cukup rendah kepada para tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun hasil pertanian mereka yang berupa ubi kayu bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, namun pada kenyataannya kemiskinan di Gunungkidul tetap tidak mampu dihindari.¹⁵

3. Kondisi Politik Pemerintahan

Susunan birokrasi di Gunungkidul pada tahun 1946 menyesuaikan dengan susunan birokrasi Provinsi DIY. Sebelum adanya reorganisasi sistem pemerintahan, susunan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang bupati yang bertanggungjawab langsung kepada Sultan, saat itu bupati yang menjabat

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 188.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kartono di Girisubo, Gunungkidul pada tanggal 13 Februari 2012.

adalah K.R.T. Suryaningrat¹⁶. Kabupaten Gunungkidul selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa Kepanewonan (sekarang setingkat kecamatan), Sehingga di bawah bupati ada panewu yang memerintah suatu kepanewonan. Seorang panewu juga bertanggungjawab langsung kepada bupati. Di bawah kepanewonan ada kalurahan, yang dikepalai oleh seorang lurah. Selain memiliki tanggungjawab langsung kepada panewu, lurah juga menjalin kerjasama dengan Majelis Desa. Pada saat itu lurah sudah dipilih langsung oleh rakyat. Di bawah kalurahan adalah padukuhan, yang dikepalai oleh seorang dukuh, yang bertugas sebagai pembantu lurah dan bertanggungjawab kepada lurah.¹⁷

Setelah terjadinya reorganisasi pemerintahan maka susunan birokrasi di Gunungkidul dari tahun 1946-1958 adalah sebagai berikut:

Bupati selain sebagai kepala daerah yang otonom juga sebagai wakil pemerintah pusat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Istimewa Otonom (DIY), di samping bupati ada Dewan Eksekutif yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan, mereka dipilih oleh rakyat. Di bawah bupati masih tetap ada panewu yang bertanggungjawab kepada Dewan Eksekutif kabupaten, di bawah panewu ada lurah dan pembantunya serta Dewan Perwakilan, keduanya bertanggungjawab kepada Majelis Desa. Di bawah lurah selanjutnya ada kepala dukuh. Baik lurah, pembantu lurah,

¹⁶ Foto K.R.T. Suryaningrat, lihat lampiran 5 gambar 6.

¹⁷ Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm. 334.

Dewan Perwakilan, dan kepala dukuh semuanya dipilih oleh rakyat, sedangkan Majelis Desa hanya ketuanya yang dipilih oleh rakyat.¹⁸

Dalam hal efisiensi pemerintahan di tingkat desa, pada tahun 1946 Sri Sultan HB IX selaku Gubernur DIY melakukan perubahan struktural dan operasional dalam pemerintahan desa. Pekerjaan pemerintah desa mulai dipisahkan dari rumah tangga lurah, dengan pendirian Bale Desa¹⁹. Lurah beserta pamong desa yang lainnya datang ke kantor pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas kantor sehari-hari. Kemajuan di bidang ini berjalan lambat di Gunungkidul dan daerah perbukitan di Kulonprogo. Kedua daerah ini terletak jauh dari Kota Yogyakarta, tempat perubahan-perubahan sosial dimulai dan menyebar.²⁰

Perkembangan partai politik di Gunungkidul juga terus berkembang seiring dengan perkembangan politik di DIY.²¹ Tokoh-tokoh pergerakan mulai mengorganisir pengikut-pengikutnya berdasarkan kesamaan agama, ideologi, dan kepentingan atau kekaryaan untuk mempertahankan kedudukan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 335.

¹⁹ Pada zaman Belanda, rumah seorang lurah juga berfungsi sebagai kantor pamong desa. Sehingga wajar apabila pada saat itu penduduk menganggap bahwa uang kas desa dicampur dengan uang pribadi lurah. *Ibid.*, hlm. 132.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lahir dan berkembangnya partai politik di suatu negara merupakan suatu keharusan di dalam era modern, karena keberadaan partai politik dapat menjadi ukuran dan syarat penting bagi suatu negara apakah negara itu dapat disebut sebagai negara demokrasi atau bukan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Richard M. Maremen, bahwa dari semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik, politik modern tanpa partai politik sama saja dengan ikan yang berada di luar air. Nasiwan, *Teori-Teori Politik Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2010, hlm. 120.

yang telah diperolehnya dalam KNID atau dalam birokrasi pemerintahan. Di Yogyakarta, partai politik yang dibentuk atas kesamaan agama pengikut-pengikutnya adalah Masyumi²², Cabang Partai Kristen Nasional (PKN)²³ yang kemudian diubah menjadi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Cabang Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)²⁴. Partai politik yang didirikan berdasarkan ideologi non agama adalah Partai Sosialis Indonesia (Parsi)²⁵, sedangkan PNI dan PKI baru muncul belakangan di Yogyakarta, sebab PNI masih menunggu sikap pemerintah lebih lanjut tentang PNI yang ditetapkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersama dengan BKR dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), sedangkan tokoh-tokoh PKI sendiri pada saat itu masih bergabung dengan Partai Sosialis dan Partai Buruh

²² Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 November 1945.

²³ Induk dari PKN didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1945. Pada tanggal 6-7 Desember PKN mengadakan Kongres I di Surakarta dan kongres tersebut mengubah PKN menjadi Parkindo seperti yang dipakai oleh Cabang Yogyakarta. P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 202.

²⁴ Cabang PKRI Yogyakarta didirikan pada akhir Desember 1945, sedangkan induknya didirikan di Surakarta pada tanggal 8 Desember 1945. *Ibid.*

²⁵ Parsi didirikan pada tanggal 12 November 1945 dengan ketua dewan partainya Amir Syarifuddin dan wakil ketuanya Sukindar. Parsi tidak lama mandiri karena pada tanggal 17 Desember 1945 mengadakan fusi dengan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang didirikan pada 19 November 1945 di Cirebon dengan ketua umumnya Syahrir. Fusi antara Parsi dan Paras pada tanggal 19 Desember 1945 itu kemudian menjadi Partai Sosialis yang mendukung Kabinet Syahrir dengan ketuanya Amir Syarifuddin. *Ibid.*, hlm. 202-203.

Indonesia.²⁶ Baru pada bulan Oktober 1945 PKI secara resmi kembali terbentuk kemudian PNI menyusul pada bulan Januari 1946.²⁷

Selain partai politik, muncul juga organisasi massa yang mempunyai perhatian terhadap penyusunan kembali birokrasi pemerintahan di Yogyakarta, yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI) dan juga Organisasi Pemuda hasil Kongres Pemuda Indonesia I di Yogyakarta pada tanggal 10-11 November 1945. BTI merupakan kelompok kader petani yang dibina oleh KNID, kemudian diorganisir menjadi organisasi formal yang cukup tangguh oleh tokoh-tokoh Taman Siswa.²⁸ Organisasi Pemuda merupakan hasil gabungan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Gassema (Gabungan Sekolah-sekolah Menengah Mataram), Pemuda Buruh, Pemuda Tani, dan sebagainya. Sebelum adanya kongres pemuda yang diadakan pada tanggal 10-11 November 1945 di Yogyakarta, kecuali Gassema, organisasi-organisasi pemuda tersebut masih bersifat spontan yang ditujukan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan dan mengusir penjajah.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 203.

²⁷ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*. a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 332-333.

²⁸ P.J. Suwarno, *loc.cit.*

B. Gunungkidul Basis PKI di DIY

1. Kebangkitan Kembali PKI

Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913, yang diperkenalkan oleh Hendricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet. Dia adalah mantan Ketua Sekretariat Buruh Nasional dan mantan pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di Negeri Belanda. Pada tanggal 9 Mei 1914, bersama dengan P. Bersgma, J.A. Brandstedder, H.W. Dekker, dan sekitar enam puluh orang sosial demokrat lainnya, Sneevliet mendirikan organisasi politik yang bersikap radikal, *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat India.²⁹ Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1920 namanya diubah menjadi Perserikatan Komunis de Indie (PKI)³⁰, Semaun dan Darsono diangkat sebagai ketua dan wakil.³¹

Setelah terbentuknya PKI³², untuk mencapai tujuan politik mereka yaitu mendirikan pemerintahan komunis, secara terang-terangan mereka mulai

²⁹ Ruth T. Mc.Vey, *The Rise of Indonesian Communism*. a.b. Tim Komunitas Bambu, *Kemunculan Komunisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, hlm. 22.

³⁰ Pada saat kongres PKI pada tanggal 7-10 Juni 1924 nama Perserikatan Komunis de Indie secara resmi diganti dengan Partai Komunis Indonesia. Mabas ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid I*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm. 10.

³¹ Semaun dan Darsono sebelumnya adalah pimpinan SI (Sarekat Islam) Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum berubah nama menjadi PKI, ISDV telah berhasil mempengaruhi para pimpinan SI di Semarang. Dalam perkembangannya SI mengalami perpecahan dari dalam dikarenakan adanya kepemimpinan Semaun dan Darsono tersebut, karena selain menjadi ketua PKI, keduanya tetap aktif dalam SI Semarang sebagai ketua sekaligus pimpinan media massa SI, Sinar Hindia. *Ibid.*, hlm. 7.

³² Lambang PKI, lihat lampiran 4 gambar 3.

melakukan propaganda besar-besaran ke masyarakat melalui berbagai surat kabar yang mereka miliki. Propaganda mereka yang akan selalu memperjuangkan nasib rakyat miskin, kaum buruh, dan petani ternyata cukup berhasil. Maka pecahlah pemberontakan yang terjadi secara serempak diberbagai tempat pada tahun 1926-1927. Akibatnya pada tahun 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Setelah Indonesia merdeka, oleh kelompok Amir Syarifuddin³³ PKI mulai dibangkitkan kembali dengan berusaha melakukan konsolidasi dan membagi tugas dalam berbagai bidang. Mereka mulai aktif mengerakkan kader-kadernya untuk menguasai gerakan-gerakan pemuda yang mulai bermunculan, bahkan mereka kemudian berhasil mendirikan organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang berhaluan komunis, dan akhirnya membentuk Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Selain menguasai gerakan pemuda, PKI juga mulai menguasai gerakan buruh. Usaha ini mulai tampak

³³ Pada masa awal kemedekaan pengikut komunisme di Indonesia terbagi atas beberapa kelompok, yaitu: a). Kelompok partai ilegal yang didirikan oleh Musso pada tahun 1935 di Surabaya. b). Kelompok Joyoboyo yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Joesoeph dan Mr. Suprpto yang mengikuti garis Stalin. c). Kelompok Amir Syarifuddin, Njono, Oei Gee Hwat dan Widarta. d). Kelompok Nederland terdiri atas anggota PKI bekas pengurus PI, mereka adalah Abdul Madjid Djodjodiningrat, Setiadjud, Maruto Darusman dan Suripno. e), Kelompok Digul yang dipimpin oleh Sardjono, Achmad Sumadi, Harjono. Mabas ABRI, *Ibid.*, hlm. 71-72.

pada saat Njono menggantikan Koesnaeni sebagai ketua Barisan Buruh Indonesia (BBI) Jakarta pada tanggal 6 September 1945.³⁴

Setelah berhasil menguasai gerakan pemuda dan buruh, selanjutnya di bidang politik Amir Syarifuddin mulai melakukan konsolidasi dengan sisa-sisa kelompok gerakan bawah tanah PKI yang telah tercerai berai. Pada tanggal 12 November 1945 dia mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi). Azas perjuangan Parsi adalah membangun masyarakat sosialis dengan buruh, tani dan tentara sebagai tulang punggungnya. Amir Syarifuddin juga menjalin kerjasama dengan Syahrir yang berhaluan sosialis, maka Parsi kemudian melakukan fusi dengan Paras (Partai Rakyat Sosialis) menjadi Partai Sosialis. Pada pertengahan tahun 1946 anggota-anggota kelompok PKI yang sempat tercerai berai di berbagai tempat mulai berdatangan kembali ke Indonesia. Kedatangan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok ini membuat PKI siap untuk kembali menjadi partai legal di Indonesia.³⁵

Kebangkitan kembali komunis di bawah pimpinan Amir Syarifuddin juga ditunjukkan dalam bidang militer. Amir Syarifuddin dan orang-orang yang berhaluan komunis mulai melakukan pembinaan terhadap PRI Surabaya menjadi sebuah satuan bersenjata. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Atmadji (semula adalah sekretaris Gerindo di bawah Mr. Amir Syarifudin) bersama-sama para bekas pelaut yang dipengaruhi paham komunis mendirikan Marine Keamanan Rakyat (MKR). Selaku Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin

³⁴ *Ibid.*, hlm. 63-73.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

juga membentuk Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), kader-kader Pepolit tersebut nantinya akan disebar ke dalam tubuh Tentara Republik Indonesia (TRI). Pembentukan Pepolit menunjukkan adanya upaya kelompok komunis untuk menguasai tentara melalui jalur ideologi.³⁶

TRI (Tentara Republik Indonesia) sendiri merupakan organisasi militer Indonesia yang dibentuk pada tanggal 25 Januari 1946. Perkembangan organisasi militer Indonesia dimulai dengan dibentuknya BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bukan merupakan tentara reguler. Didirikan pada tanggal 22 Agustus 1945, terdiri dari unsur PETA, KNIL, Heiho, dll. BKR berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tanggal 5 Oktober 1945. BKR berubah menjadi TRI dan pada tanggal 3 juni 1947 secara resmi disahkan adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan gabungan dari TRI, kesatuan biro perjuangan dan pasukan-pasukan bersenjata lainnya.³⁷

Disaat Amir Syarifuddin mulai berupaya untuk melakukan konsolidasi serta memperkuat jaringan komunis di tingkat pusat, usaha yang tidak kalah gencar juga mulai dilakukan oleh anggota-anggota PKI di tingkat lokal. Mereka mulai mengumpulkan kembali kader-kader partai yang sempat tercerai berai akibat kegagalan pemberontakan pada tahun 1926-1927 dan

³⁶ Sardiman AM., *Panglima Besar Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000, hlm. 161.

³⁷ Cholisin, *Militer dan Gerakan Prodemokrasi: studi analisis tentang respons militer terhadap gerakan prodemokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002, hlm. 26.

juga pemberontakan yang mereka lakukan di berbagai daerah pada awal kemerdekaan RI.³⁸ Setelah berhasil mengumpulkan kader-kader mereka yang dikenal militan, selanjutnya mereka mulai memasukkan pengaruh-pengaruh mereka ke dalam pemerintahan tingkat lokal. Di Gunungkidul sendiri usaha mereka untuk memperkuat kembali kedudukannya dilakukan dengan cara masuk ke dalam tubuh PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia) dan Badan Eksekutif tingkat kabupaten.

2. PKI Memanfaatkan Keadaan Masyarakat Gunungkidul

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kader-kader PKI adalah kepandaian mereka dalam membaca situasi dan memanfaatkan keadaan dimana mereka berada. Seperti yang tampak pada saat Amir Syarifuddin dan rekan-rekannya yang dapat kembali membangkitkan PKI pada saat rakyat Indonesia sedang berjuang menegakkan kemerdekaannya, kader-kader PKI di DIY dan khususnya di Kabupaten Gunungkidul juga memanfaatkan keadaan dari kondisi masyarakat Gunungkidul sendiri. Kondisi masyarakat yang sebagian besar merupakan kaum petani miskin yang masih awam tentang politik benar-banar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PKI untuk menjadikan Gunungkidul sebagai basis kekuatan mereka di Provinsi DIY.

Untuk melapangkan jalan mereka dalam menyebarkan pengaruh komunis di Gunungkidul dan DIY pada umumnya, mereka memanfaatkan organisasi BTI yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh lama Partai Komunis di

³⁸ Pada masa awal kemerdekaan (1945) PKI juga pernah melakukan usaha perebutan kekuasaan tingkat lokal di berbagai daerah, seperti di Serang, Tangerang, Karesidenan Pekalongan (Peristiwa Tiga Daerah; Brebes, Pemalang, Tegal), Bojonegoro, dan Cirebon.

DIY. Melalui BTI mereka dapat secara resmi mengorganisir kaum tani, yang selanjutnya pada kesempatan tersebut mereka manfaatkan untuk mendekati dan menyebarkan paham komunisnya kepada kaum tani.³⁹ Posisi-posisi penting di dalam BTI di seluruh DIY dipegang oleh orang-orang komunis atau pendukungnya. Mereka berhasil mengendalikan BTI secara terus-menerus hampir selama dua tahun, sampai akhirnya partai-partai lain yang mulai berkembang lagi mengetahui strategi kaum komunis. Partai-partai tersebut kemudian berupaya untuk melawan dengan membentuk organisasi-organisasi tani mereka sendiri. Misalnya dengan pembentukan STII (Sarekat Tani Islam Indonesia) oleh partai-partai politik Islam.⁴⁰

Masih minimnya pengetahuan politik masyarakat pedesaan di Gunungkidul juga dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang komunis untuk terus menancapkan paham komunisnya di daerah ini. Tidak jarang mereka menyelenggarakan pertunjukkan-pertunjukkan kesenian, misalnya kethoprak.⁴¹ Masyarakat desa yang biasanya kekurangan hiburan tentu saja akan berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertunjukkan kethoprak tersebut. Cerita-cerita rakyat yang dibawakan di dalam pertunjukkan kethoprak ini biasanya disisipi dengan slogan-slogan komunis

³⁹ Wawancara dengan Cipto Sumarno di Semin, Gunungkidul, pada tanggal 15 Februari 2012.

⁴⁰ Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm. 139.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 150.

tanpa mengganggu isi cerita, dengan cara tersebut secara perlahan dalam diri masyarakat sudah mulai ditanamkan jiwa-jiwa komunis.⁴²

Secara garis besar ada tiga cara yang dipakai oleh PKI dalam usahanya menyebarkan pengaruh komunis di Gunungkidul. *Pertama*, masyarakat Gunungkidul saat itu mayoritas petani miskin. Maka digunakan propaganda dan janji-janji bahwa mereka akan memperjuangkan nasib para petani di Gunungkidul. *Kedua* adalah pengrekrutan melalui jalur pernikahan. Ini juga cukup efektif. Kader-kader PKI melakukan pernikahan dengan anggota keluarga yang belum terkena paham komunis, selanjutnya kader PKI tersebut akan mengajak keluarga dan sanak kerabatnya yang lain untuk bergabung dengan PKI.⁴³ *Ketiga* adalah membentuk kelompok-kelompok rakyat, misalnya PPDI, Pemuda Rakyat, BTI, dan sebagainya. PPDI menjadi organisasi yang paling berperan, sikap masyarakat pedesaan yang sangat patuh terhadap lurah dan pamong desa yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok-kelompok PKI.

3. Kaderisasi PKI di Gunungkidul

Masa awal revolusi ternyata juga menjadi masa awal kebangkitan PKI, meskipun hanya memiliki sejumlah kecil anggota lama yang ada di Yogyakarta, mereka mulai kembali mengadakan kegiatan-kegiatan untuk partainya. Berbeda dengan partai-partai non komunis, mereka tidak berusaha

⁴² Wawancara dengan Bapak Parmo Sentono di Rongkop, Gunungkidul pada tanggal 12 Februari 2012.

⁴³ *Ibid.*

menarik pengikut secara langsung, namun mereka berusaha untuk memperoleh fasilitas-fasilitas resmi dari KNI untuk mengorganisir kaum tani ke dalam BTI dan kaum buruh ke dalam BBI (Barisan Buruh Indonesia)⁴⁴ dan kemudian kedalam SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

PKI juga berhasil dalam mendapatkan dukungan aktif dari ketua PPDI di Gunungkidul, yang pada saat itu berusaha agar pengurus PPDI di kabupaten tersebut mendukung PKI. Di Kabupaten Gunungkidul, sekitar 80% lurah dan anggota pamong desa adalah anggota PPDI, yang cabangnya di Gunungkidul sangat erat dalam bekerjasama dengan PKI. Partai tersebut menduduki 19 dari 35 kursi dalam Dewan Perwakilan Kabupaten, dan 3 dari 5 kursi dalam Dewan Eksekutif ditambah kursi ketua DPD. Salah seorang dari ketiga anggota PKI dalam DPD sekaligus juga ketua PPDI cabang Gunungkidul.⁴⁵

PKI tidak begitu memperhatikan tentang keanggotaan resmi yang besar, namun mereka lebih mementingkan anggota yang terorganisir dan berpengaruh di dalam masyarakat. Mereka membina suatu kelompok

⁴⁴ BBI didirikan pada tahun 1945 oleh KNI provinsi melalui pemilihan dua orang pekerja pada perusahaan yang diawasi oleh Jepang untuk dilatih dalam teori dan praktik tentang organisasi buruh. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk merebut pengelolaan perusahaan dari Jepang dan menempatkannya di bawah pengawasan KNI. Dalam perkembangannya banyak kekuatan-kekuatan partai politik di dalam tubuh BBI yang berusaha untuk menguasai gerakan buruh demi kepentingan partai. Pada konferensi nasional BBI tahun 1946 organisasi ini dibubarkan untuk memberikan jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi buruh yang baru, salah satunya adalah SOBSI yang disponsori oleh komunis. Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm. 139.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

pimpinan yang kecil tetapi militan dan disiplin,⁴⁶ dan selanjutnya mereka akan berusaha mempengaruhi rakyat melalui organisasi-organisasi massa seperti BTI dan SOBSI. Di Kecamatan Ponjong dan Karangmojo, usaha PKI tersebut mendapatkan tanggapan yang cukup baik, bahkan para anggota komunis di kedua kecamatan tersebut telah aktif sejak tahun dua puluhan.⁴⁷

PKI berkembang menjadi sebuah partai yang paling baik organisasinya. Mereka mampu membuat semua anggotanya begitu taat dalam mengikuti pimpinan partai, termasuk yang ada dalam PPDI. Sementara itu di Gunungkidul tidak ada seorangpun pegawai pamong praja yang berhubungan dengan PKI. Hal ini dimungkinkan karena para pamong praja ini diangkat, dipindahkan, bahkan diberhentikan oleh pemerintah provinsi, sedangkan di tingkat Provinsi DIY sendiri PKI tidak memiliki kedudukan mayoritas. Keadaan tersebut tentu saja menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara lurah dengan panewu.

Keadaan yang tidak harmonis tersebut tentunya juga mengganggu jalannya pemerintahan. Seringkali terjadi keterlambatan laporan berkala

⁴⁶ Pada dasarnya partai politik merupakan suatu entitas dan bagian dari mekanisme, tidak dapat selalu didefinisikan dengan totalitas anggotanya dan juga dengan kelas yang memiliki partai itu. Karena partai yang awalnya dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan pada akhirnya telah mejadi tujuan itu sendiri, serta dibekali oleh cara-cara dan kepentingan-kepentingan, maka dari sudut pandang teologis partai terpisah dari kelas yang diwakilinya. Adanya militansi dalam sebuah partai politik sebenarnya masih terlihat samar, karena semua itu tidak lebih dari sekedar adanya suatu kepentingan dalam partai politik tersebut. Ketika tujuannya telah tercapai, militansi itu bisa hilang sewaktu-waktu. Nasiwan, *op.cit.*, hlm. 124.

⁴⁷ Selo Soemardjan, *op.cit.*, hlm. 143.

tentang perkembangan penduduk yang harus diberikan oleh kepala desa kepada panewu. Lurah tidak lagi mengakui bahwa kedudukan mereka sebenarnya lebih rendah dari seorang panewu. Hal ini menimbulkan keluhan dari panewu dan mengadukannya ke Dewan Eksekutif Kabupaten, namun dengan mudah keluhan tersebut mereka kesampingkan, karena mereka memiliki hubungan yang dekat dengan para lurah serta anggota PPDI.⁴⁸

Dibandingkan dengan keadaan di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi DIY, keadaan yang demikian itu merupakan yang paling ekstrim. Di kabupaten lain partai politik yang berkuasa tidak begitu terorganisir dengan baik serta agresif, sehingga hubungan resmi antara panewu dengan lurah desa maupun pamong desa tidak banyak mengalami hambatan.⁴⁹ Organisasi yang baik serta agresifitas PKI di Gunungkidul inilah yang kelak akan mempermudah jalan mereka untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat yang pada saat itu masih mudah terpengaruh. Politik mereka untuk menarik dan mengorganisir para lurah dan pamong desa yang memiliki hubungan dekat dengan rakyat merupakan suatu politik yang cukup efektif.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

⁴⁹ *Ibid.*

C. Dari Peristiwa Madiun ke Gunungkidul

1. Madiun sebagai Basis Utama Gerakan FDR/PKI

Pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 dalam usaha mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pihak RI dan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, RI menjadi pihak yang dirugikan karena wilayah yang dimiliki semakin sempit. Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin yang menandatangani perundingan tersebut dianggap merugikan bangsa. Akibatnya kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Hatta pada tanggal 29 Januari 1948.⁵⁰

Sebagai bentuk rasa kecewa, Amir Syarifuddin selanjutnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta, yang anggotanya terdiri dari partai-partai seperti PKI, Partai Sosialis, serta Partai Buruh Indonesia. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan di bawah Kabinet Hatta.⁵¹ Pada perkembangannya FDR di bawah pimpinan Amir Syarifuddin tidak hanya berperan sebagai oposisi, tetapi mulai ada tanda-tanda usaha perebutan kekuasaan dari tangan pemerintah. Mereka mulai melakukan aksi-aksi yang bersifat menentang pemerintah. Beberapa aksi yang dijalankan

⁵⁰ Mabes ABRI, *op.cit.*, hlm. 8.

⁵¹ Tashadi, (dkk)., *Keterlibatan Ulama di DIY pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 65.

kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan di beberapa tempat.

Ketika aksi-aksi antipemerintah yang dijalankan oleh FDR sedang berlangsung, Musso seorang tokoh komunis yang sebelumnya berada di Moskow, Uni Soviet, kembali datang ke Indonesia. Dia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan dia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, dia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekkan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam.⁵²

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi dipilihnya Madiun sebagai basis utama gerakan PKI di seluruh Indonesia baik secara ideologi maupun politis. Letak Madiun berada pada jalur transportasi kereta api Jombang-Yogyakarta, sehingga pengangkutan pasukan serta mobilitasnya terjamin. Di Madiun juga terdapat bengkel induk kereta api yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Gula Rejoagung, buruh dari pabrik gula tersebut telah dipengaruhi oleh PKI. Madiun juga memiliki banyak pabrik gula yang dinilai

⁵² *Ibid.*, hlm. 66.

memiliki syarat-syarat ekonomis dan strategis bagi gerakan PKI. Selain berhasil mempengaruhi buruh, di Madiun PKI juga telah berhasil mempengaruhi tokoh masyarakat dan petani dengan berbagai macam janji yang muluk-muluk, antara lain adalah pemberian kedudukan serta tanah-tanah sebagai lahan pertanian.⁵³

Hal lain yang menguntungkan PKI dalam pemilihan Madiun sebagai basis utama gerakan mereka adalah dengan adanya momentum rasionalisasi angkatan bersenjata oleh pemerintah. TNI di Madiun yang sebelumnya berkekuatan satu brigade dirasionalisasi menjadi satu Sub Teritorial Comando (S-TC), yaitu instansi teritorial yang tidak membawahi pasukan tempur. Madiun yang sebelumnya termasuk ke dalam wilayah Divisi V Ronggolawe (Bojonegoro) menjadi wilayah Divisi II (Jawa Tengah Bagian Timur), tidak termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Divisi Jawa Timur,⁵⁴ sehingga dari segi militer, Madiun menjadi wilayah yang tidak begitu tangguh.

Keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh PKI dengan menempatkan pasukan-pasukannya di Madiun. Pasukan-pasukan PKI mulai menjaga objek-objek vital yang ada di Madiun, seperti alun-alun, pasar, stasiun kereta api, perempatan jalan-jalan besar, jembatan, dan sebagainya. Mereka melakukan penggeledahan terhadap para pejalan kaki yang melintas, hal ini tentu saja menimbulkan ketakutan bagi penduduk kota.

⁵³ Mabes ABRI, *op.cit.*, hlm. 114.

⁵⁴ *Ibid.*

Usaha PKI untuk mempersiapkan Madiun sebagai basis utama gerakan mereka ditunjukkan dengan pemindahan kantor Pesindo dari Mojosari (Mojokerto) ke Madiun pada bulan Januari 1946. Mereka juga memindahkan Kantor Dewan Pekerja/Pembangunan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) ke Madiun. Tugas dari Dewan Pekerja/Pembangunan BKPRI ini mengurus mobilisasi kekuatan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Pesindo seperti Sumarsono dan Kusnandar.⁵⁵ Di Madiun, BKPRI juga mendirikan radio “Gelora Pemuda” sebagai sarana komunikasi dan provokasi mereka.

2. Aksi PKI di Madiun

Setelah Madiun dipersiapkan sedemikian rupa maka dimulailah gerakan untuk menguasai Madiun secara penuh. Antara tanggal 10 dan 18 September 1948 PKI mulai melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh lawan politiknya.⁵⁶ Selain terhadap lawan-lawan politiknya, PKI juga mulai melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh pemerintahan, seperti walikota, beberapa wedana dan camat, juga beberapa pegawai instansi pemerintahan.⁵⁷ Tidak hanya di Kota Madiun, kerusuhan dan pembunuhan juga mulai terjadi di beberapa daerah sekitar Madiun, seperti di Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan sebagainya.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 112-114.

⁵⁶ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerekaan Indonesia, Jilid 8, Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: DISJARAH-AD, 1979, hlm. 237.

⁵⁷ Mabes ABRI, *op.cit.*, hlm. 115-116.

Sebelum melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para pegawai pemerintah yang anti PKI, mereka telah mempersiapkan orang-orangnya untuk menggantikan para pejabat daerah yang akan diculik. Demikian juga ditingkat desa, telah dipersiapkan dewan-dewan desa, sekaligus calon kepala desanya. Disamping itu mereka juga melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mendukung gerakan FDR/PKI.⁵⁸ Sehingga perebutan kekuasaan dan pemberontakan PKI di Madiun ini merupakan sebuah tindakan yang telah jauh-jauh hari dipersiapkan, bukan sebuah tindakan responsif yang dimaksudkan sebagai perlawanan terhadap serangan TNI kepada kelompok FDR sebagaimana yang mereka kemukakan.⁵⁹

Tanggal 18 September 1948 menjadi puncak dari gerakan PKI Madiun. Pasukan PKI yang berseragam hitam segera menguasai objek-objek vital di dalam kota. Mereka mulai menyandera dan menangkap para pegawai pemerintah dan militer, selanjutnya tokoh-tokoh Pesindo segera memproklamirkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia” dan membentuk Pemerintahan Front Nasional.⁶⁰ Setelah berhasil membentuk Pemerintahan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

⁵⁹ Lihat pengakuan Soemarsono (tokoh Pesindo) dalam, Hersri Setiawan, *Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*. FusPAD, 2002, hlm. 92-101.

⁶⁰ Alasan pembentukan Pemerintahan Front Nasional oleh orang-orang PKI di Madiun adalah sebagai pembelaan diri atas sikap pemerintah pusat terhadap orang-orang PKI. Pemerintah pusat menyatakan bahwa Madiun telah memberontak, maka mereka memerintahkan untuk menangkap hidup ataupun mati orang-orang PKI. *Ibid.*, hlm. 100-101.

Front Nasional, ditandai dengan pengibaran bendera Merah, mereka menyatakan bahwa Madiun adalah “daerah yang dibebaskan”.⁶¹

Sebenarnya sejak tanggal 12 September 1948, dengan cara yang sangat teratur ternyata mereka telah merebut kekuasaan di desa-desa yang terletak di sekitar Madiun. Mereka menculik dan membunuh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mau bergabung dengan kelompok mereka. Pada tanggal 18 September 1948 selesailah perebutan kekuasaan atas seluruh Madiun. Dari Madiun komunis berencana untuk menguasai seluruh Jawa dan RI.⁶²

Peristiwa PKI Madiun selanjutnya mulai menyebar ke beberapa daerah di sekitar Madiun bahkan sampai ke daerah DIY khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Ada beberapa persamaan antara gerakan PKI di Madiun dan Gunungkidul, baik dari segi perencanaan maupun dalam aksinya. Perbedaannya hanyalah pada skalanya, jika Madiun dijadikan sebagai basis gerakan PKI tingkat nasional, maka Gunungkidul merupakan basis gerakan PKI tingkat lokal di daerah DIY. Kerusuhan yang ditimbulkan oleh pasukan PKI di Semin setelah tanggal 18 September 1948 merupakan dampak langsung dari pemberontakan PKI Madiun. Pasukan PKI Madiun yang terdesak ke arah barat kemudian sampai di daerah Semin dan tetap menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

⁶¹ Mabes ABRI, *loc.cit.*

⁶² A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 239.

Namun dilihat dari banyaknya kader-kader partai komunis yang ada di Gunungkidul serta aktivitas mereka, menunjukkan bahwasannya Gunungkidul jauh-jauh hari juga sudah dipersiapkan untuk dikuasai sepenuhnya oleh PKI. Alasan pemilihan Gunungkidul sebagai basis utama gerakan mereka di DIY juga terkait dengan letak geografis serta kondisi masyarakatnya. Mereka memperkirakan bahwasannya tidak lama lagi Yogyakarta akan jatuh ke tangan Belanda, sehingga kemungkinan besar pemerintahan DIY bahkan RI akan dipindahkan ke Gunungkidul sebagai daerah yang relatif aman dari serangan pasukan Belanda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di DIY.⁶³ Ketika sebelumnya PKI telah berhasil menguasai Gunungkidul, maka jalan untuk menguasai DIY bahkan pemerintah RI akan semakin mudah.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 372.

BAB IV

USAHA ASKAR PERANG SABIL (APS) DALAM OPERASI PENUMPASAN PKI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Menentang Aksi PKI

1. Pertentangan APS dan PKI

Jauh sebelum APS lahir, pertentangan antara umat Islam di Indonesia dengan PKI sudah mulai muncul. Pertentangan ini diakibatkan oleh banyak faktor, mulai agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Ideologi komunis yang diusung oleh PKI menjadi penyebabnya, ideologi ini banyak ditentang oleh umat Islam dan dianggap menyesatkan, demikian juga bagi komunis, Islam bahkan juga agama-agama yang lain dianggap sebagai penghalang dalam gerakan mereka,¹ sehingga konflik antara Islam dan komunis di Indonesia sudah dimulai sejak masuknya paham komunis di Indonesia pada tahun 1913 yang dibawa oleh Sneevliet yang *notabane* nya adalah seorang Belanda.

Penyebab kaum komunis menentang agama dikarenakan komunisme adalah sebuah paham yang berpangkal pada ajaran Karl Marx. Menurut Marx dalam dunia tidak ada yang lebih penting dari pada materi. Dia mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada jiwa, tidak ada kehidupan yang kekal. Dia menghendaki suatu masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki tanah dan alat-alat produksi. Manusia harus menjunjung negara sebagai sebuah kekuasaan yang tertinggi dan wajib menjalankan segala

¹ Lembaga Kader, *Komunisme dan Agama*. Djatinegara: Lembaga Kader, t.t., hlm. 5.

perintah negara. Cita-cita tersebut hanya akan dapat terlaksana apabila agama berada di bawah negara, bahkan jika perlu agama harus dilenyapkan.²

Sama dengan ajaran komunis, dalam Islam pun juga mengenal adanya sosialis. Perbedaannya adalah sosialisme Islam lebih mengenal kasih sayang dibandingkan sosialisme komunis, sosialisme Islam adalah sosialisme yang religius, sosialisme ketuhanan. Di Indonesia, sosialisme Islam adalah sosialisme yang sesuai dengan Pancasila. Dalam sosialisme Islam juga dibahas mengenai kemiskinan masyarakat umum dan tentang hak milik, dalam menyikapi kedua masalah tersebut Islam menggunakan cara-cara yang lebih halus, cara-cara yang sesuai dengan perintah Allah dan Sabda Nabi Muhammad saw., sedangkan dalam komunis cara-cara untuk mendapatkan persamaan hak tersebut dilakukan dengan cara yang lebih radikal atau ekstrim.³

Pertentangan antara umat Islam dengan komunis di Indonesia pada perkembangannya berubah menjadi pertentangan antara Muhammadiyah dengan PKI. Sebagai sebuah gerakan pembaruan Islam yang dikenal reformis, Muhammadiyah sangat gencar melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan PKI yang dianggap sangat membahayakan bagi persatuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Perselisihan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor agama saja, tetapi juga sudah mulai dimasuki oleh faktor politik.

² *Ibid.*, hlm. 5-6.

³ Ibrahim Lubis, *Islam Membendung Arus Komunisme*. Jakarta: Telaga Bening, 1976, hlm. 92-95.

Muhammadiyah mulai khawatir jika anggota-anggotanya sampai terseret masuk ke dalam PKI seperti yang dialami oleh Sarekat Islam (SI) yang harus pecah menjadi dua, karena beberapa pengikut bahkan orang-orang penting dalam SI telah masuk ke pihak komunis.⁴

Berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 menurut Prof. Dr. H. A. Mukti Ali dalam tulisannya yang berjudul “Interpretasi Amalan-amalan Muhammadiyah” diklasifikasikan melalui empat amalan. Pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, reformasi doktrin-doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Ketiga, reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan. Keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar.⁵ Dari amalan yang keempat tersebut tampak bahwa Muhammadiyah akan berusaha untuk mempertahankan Islam dari serangan-serangan yang berasal dari luar, dalam hal ini tentu saja termasuk mempertahankan Islam dari ancaman komunis.

Di daerah Yogyakarta, awal konflik terbuka antara Muhammadiyah dan PKI terjadi pada tahun 1924 saat diselenggarakannya Kongres PKI di

⁴ Orang-orang komunis tidak mengenal agama, namun pada praktiknya di Indonesia juga di negara-negara lain, komunis juga masuk ke dalam organisasi maupun parpol yang berlatar belakang agama. Hal ini disebabkan komunis menyadari bahwa mereka harus bisa mempengaruhi golongan-golongan beragama tersebut dengan cara menyusup. Mereka mengatakan bahwa antara komunis dan agama harus bekerjasama, karena memiliki cita-cita yang sama yaitu menghilangkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Lembaga Kader, *op.cit.*, hlm. 6.

⁵ Syahrudin Darwis, “Muhammadiyah dan Gerakan Reformis Islam di Indonesia”. *Driyarkara*, Tahun XXIII No.2, 1997, hlm. 69.

Kotagede. Bahkan sebelum kongres dilaksanakan, aroma konflik sudah mulai muncul dengan tidak mendapatkannya tempat bagi PKI untuk melakukan kongres di dalam Kota Yogyakarta karena dihalang-halangi oleh SI Putih (Sarekat Islam yang anti komunis) dan Muhammadiyah. Dalam acara rapat umum propaganda yang merupakan bagian dari rangkaian acara kongres pada tanggal 14 Desember 1924, hadir juga beberapa orang anggota Muhammadiyah, mereka kemudian membuat keributan dengan mengajak semua orang yang mengaku beragama Islam untuk keluar dari rapat tersebut, akibatnya situasi rapat menjadi tegang.⁶

Peristiwa *walk out* yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah dalam rapat umum PKI tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka untuk menentang PKI. Aksi tersebut juga dimaksudkan untuk mengadakan demonstrasi kekuatan kepada yang hadir dalam rapat bahwa “orang Islam sejati” agar tidak mendukung PKI yang telah menjelekkan agama. Selain itu, aksi ini merupakan ungkapan keteguhan hati mereka yang berani dan tulus bahwa Islam dan komunis adalah bertentangan. Akibat dari insiden tersebut, PKI dan Sarekat Rakyat (SI berhaluan kiri) menjadi begitu membenci para pemimpin Muhammadiyah, melebihi kebencian mereka terhadap Islam.⁷

⁶ Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. a.b. Yusron Asropie, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983, hlm. 80-81.

⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

Setelah Indonesia merdeka pertentangan yang terlihat antara umat Islam dan PKI lebih banyak dalam bidang politik, terutama setelah dibentuknya Masyumi pada tanggal 8 November 1945. Pertentangan ini dikarenakan Masyumi sebagai partai politik yang bernafaskan Islam sebagian besar pengurusnya adalah orang-orang Muhammadiyah, sehingga wajar kiranya jika kebencian PKI kepada Muhammadiyah berlanjut kepada Masyumi, begitu juga sebaliknya. Pada tanggal 3 Juli 1947 Amir Syarifuddin berhasil menyusun kabinet baru, dan Masyumi tidak duduk dalam kabinet, maka pada tanggal 6 Juli 1947 Masyumi menyatakan oposisi terhadap pemerintah.⁸

Di bidang ekonomi PKI berupaya untuk menarik pengikut dengan cara mengeluarkan program perbaikan perekonomian bagi buruh dan petani. Dalam aksinya ini PKI memanfaatkan dua buah organisasi yang telah berhasil dikuasainya yaitu SOBSI dan BTI. Melalui kedua organisasi tersebut PKI mulai banyak menyebarkan paham komunisnya terhadap rakyat. Pada perkembangannya ternyata usaha PKI tersebut banyak mendapatkan kemajuan dengan semakin banyaknya dukungan yang mereka peroleh melalui BTI. Melihat kenyataan tersebut maka Masyumi dan partai-partai politik Islam yang lain kemudian mendirikan STII.⁹

⁸ MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990, hlm. 215.

⁹ Selo Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*. a.b. H.J. Koesoemanto. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 139.

Sikap APS yang anti komunis juga berasal dari para pemimpinnya, misalnya Ki Bagus Hadikusumo (Penasehat APS dan Ketua PP Muhammadiyah). Pada tahun 1946 ketika Amir Syarifuddin membentuk Pepolit, Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Muhammadiyah yang lain sering diajak untuk mendiskusikan masalah-masalah kententaraan oleh Jenderal Sudirman.¹⁰ Sejak saat itu mereka semakin mencurigai gerak-gerik orang-orang komunis yang akan mencoba untuk menghimpun kekuatan, sehingga mereka selalu waspada terhadap kaum komunis. Kewaspadaan tersebut kemudian mereka bawa ke dalam APS sebagai sebuah organisasi militer yang mereka miliki.

Sebagai sebuah kelaskaran yang dibentuk oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, MU-APS menjadi sebuah organisasi kelaskaran yang memegang teguh ajaran agama Islam dan konsisten menentang komunis.¹¹ Meskipun tidak mengatasnamakan APS, di sela-sela perjuangannya mempertahankan Yogyakarta dan RI dari serangan tentara Belanda, namun tokoh-tokoh penting APS terus berusaha untuk mengingatkan para anggota APS dan masyarakat muslim lainnya untuk mewaspadaai gerakan komunis yang terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

¹⁰ MT. Arifin, *op.cit.*, hlm. 216.

¹¹ Pada perkembangannya para ulama dengan tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang menganut paham komunis dengan pengertian, kesadaran dan keyakinan, akan kebenaran paham komunis yang terbukti telah bertentangan, menentang dan memusuhi Islam, maka hukumnya adalah Kafir. Syed Hasan Alatas, *Bahaya Komunis*. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise, 1980, hlm. 64-65.

2. Mengobarkan Semangat *Jihad Fii Sabillilah* Melawan PKI

Pertentangan antara APS dan PKI mencapai puncaknya pada saat meletusnya pemberontakan PKI Madiun. Selain “alasan pribadi” yang berupa pertentangan antara Masyumi dengan PKI, APS sebagai organisasi kelaskaran yang berdiri di belakang TNI untuk mempertahankan keutuhan NKRI, segera mengambil sikap untuk menghancurkan pemberontakan PKI yang mencoba morobohkan NKRI dari dalam. MU-APS segera mengerahkan pasukannya untuk membantu TNI terjun di beberapa medan pertempuran di Jawa Timur, Jawa Tengah, juga di DIY sendiri.

Untuk mengobarkan semangat juang pasukan APS, MU-APS selalu mengobarkan semangat *jihad fii sabillilah* (berperang di jalan Allah) yang selama ini menjadi salah satu doktrin dan ideologi dalam APS. Barang siapa yang gugur dalam pertempuran tersebut tidak ada balasan yang lebih layak bagi mereka selain syurga milik Allah. Bagi APS, PKI tidak jauh berbeda dengan kolonial Belanda, mereka sama-sama mencoba untuk menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang kejam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga mereka perlu ditumpas.

Selain semangat *jihad fii sabillilah*, masih banyak ajaran-ajaran lain dalam Islam yang dimanfaatkan oleh para kyai yang tergabung dalam MU-APS untuk mengobarkan semangat pasukan APS dan masyarakat muslim lainnya untuk berjuang menumpas pemberontakan PKI. Ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin itu antara lain adalah *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan melarang yang munkar), dan *habbul wathon minal iman*

(cinta tanah air sebagian dari iman).¹² Dengan adanya doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para kyai tersebut, semangat yang berlipat ganda muncul dari dalam diri pasukan APS dan masyarakat muslim untuk berjuang bersama-sama menghancurkan tindakan PKI yang dinilai sebagai sebuah kedhaliman.¹³

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap muslim sudah seharusnya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah. Demikian juga dalam APS, langkah-langkah yang diambil oleh para pimpinan APS yang berada di dalam MUAPS selalu melandaskan setiap kebijakan mereka kepada dua sumber utama hukum Islam tersebut (Al Qur'an dan As Sunnah). Firman-firman Allah dalam Al Qur'an dijadikan sebagai landasan perjuangan pasukan APS, dalam hal berperang menegakkan kebaikan, Allah telah mengaturnya dalam Surat An Nisa ayat 71-101 yang secara khusus menyampaikan taktik, tujuan, dan adab berperang dalam Islam.¹⁴

Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi, namun bukan berarti Islam adalah agama yang lemah. Dalam Islam juga diperbolehkan berperang bagi orang-orang mukmin ketika mereka dianiaya atau diserang

¹² Tashadi, (dkk)., *Keterlibatan Ulama di DIY pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 28-30.

¹³ Wawancara dengan Bapak Salim di Piyungan, Bantul pada tanggal 25 Maret 2012.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: As-Syifa', (t.t.), hlm. 189-202.

terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Hajj ayat 38-41 yang mengizinkan berperang bagi orang-orang mukmin.¹⁵ Bukan hanya sekedar mengizinkan untuk berperang, dalam Surat As Saff ayat 10-14, Allah juga berfirman bahwa kemenangan itu hanya dapat diperoleh dengan pengorbanan.¹⁶ Adanya firman-firman dari Allah yang tertuang dalam Al Qur'an tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan para ulama APS untuk mengobarkan semangat *jihad fii sabillilah* para pejuang dalam menumpas pemberontakan PKI.

Pada dasarnya doktrin-doktrin yang dipakai oleh para kyai untuk mengobarkan semangat juang pasukan APS dan umat muslim yang lainnya dalam melawan pemberontakan PKI sama dengan doktrin-doktrin yang digunakan dalam menghadapi tentara kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan para kyai menilai bahwasannya tindakan PKI ini sama saja dengan tindakan para penjajah, bahkan lebih kejam. PKI dengan terang-terangan telah mencoba untuk menghancurkan Islam dan umatnya, mereka banyak melakukan pembantaian terhadap para tokoh-tokoh agama dan umat muslim yang tidak mau mengikuti gerakan mereka.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 731-732.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1253-1254.

B. Berjuang Bersama TNI

1. Menggagalkan Rencana PKI Menguasai Gunungkidul

Sebelum terjadinya puncak pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948, di Gunungkidul telah terjadi tanda-tanda perlawanan orang-orang PKI terhadap pemerintah setempat. Pada suatu hari sekitar pukul 17.00 WIB Bupati K.R.T. Suryadiningrat sedang menerima tamu dari Yogyakarta, yaitu K.R.T. Purwakusuma, SH. beserta rombongan di kantor Bupati Gunungkidul. Tidak lama kemudian masuklah Kepala Polisi Wonosari yang disusul oleh Sugaib yang membawa revolver. Selain Sugaib, juga masuk Margono lurah desa Nglora, Paliyan dengan pedang terhunus dan Hadisukamto membawa panah yang siap dilepaskan.¹⁷ Sementara itu di luar kantor puluhan pemuda bersenjata *granggang* telah bersiap mengepung kantor Bupati Gunungkidul tersebut.¹⁸

Dalam suasana yang menegangkan tersebut Sugaib menuntut supaya Bupati Gunungkidul melepaskan Istiajid yang ditahan oleh Polisi Wonosari terkait kasus penggelapan uang koperasi tempatnya bekerja. Menghadapi situasi yang demikian maka K.R.T. Suryaningrat memberikan penjelasan secukupnya kepada Sugaib dan kawan-kawannya, dengan adanya penjelasan dari Bupati Gunungkidul tersebut maka ketegangan mulai bisa diredakan dan pengepungan pemuda atas kantor bupati segera dibubarkan. Para pemuda

¹⁷ Sugaib, Margono, dan Hadisukamto merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cukup terkemuka di Gunungkidul yang berhasil dihasut oleh orang-orang PKI.

¹⁸ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 115.

yang tadinya bermaksud melakukan pengeroyakan terhadap Bupati Gunungkidul akhirnya menyadari bahwa mereka hanya diperalat dan ditipu oleh orang-orang PKI yang berusaha untuk membebaskan Istiajid dari tahanan.¹⁹

Pada Senin malam, tanggal 18 September 1948 Kepala Polisi Wonosari mendapat perintah dari Kepala Polisi Daerah DIY untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan kudeta di Madiun pada pagi hari tadi. Sebelum menjalankan perintah tersebut Kepala Polisi Wonosari melapor kepada Bupati Gunungkidul perihal rencana tersebut. Setelah melakukan perundingan dengan bupati tentang siapa saja orang-orang yang akan ditangkap terlebih dahulu, mengingat alat-alat serta kekuatan yang ada, serta letak rumah orang-orang yang akan ditangkap, maka diputuskan bahwa penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya dilaksanakan pada malam itu juga oleh anggota Polisi Wonosari dibantu tentara dan pasukan APS.²⁰

Dalam operasi penangkapan orang-orang yang dianggap berbahaya tersebut, Polisi kembali menangkap Istiajid yang sebelumnya sempat dilepaskan dari tahanan. Dari rumah Istiajid Polisi berhasil menemukan dokumen yang berisi tentang rencana perebutan kekuasaan PKI atas Wonosari dan beberapa daerah lainnya. Pertama adalah Wonosari, yang

¹⁹ Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1996, hlm. 59.

²⁰ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 116.

direncanakan akan dikuasai pada tanggal 23 September 1948, kemudian dilanjutkan dengan Pracimantoro pada 24 September 1948, 26 September 1948 Bantul, tanggal 27 September 1948 Sleman, setelah itu kemudian dikonsentrasikan untuk menguasai kota Yogyakarta.²¹

Selain rencana perebutan kekuasaan di Gunungkidul dan DIY secara keseluruhan, dari dokumen yang berhasil disita juga didapatkan informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 1948 BTI berencana untuk menggelar rapat raksasa di Alun-alun Kota Wonosari²² yang akan diikuti oleh rakyat tani dengan satuan pemudanya yang sebelumnya telah diperintahkan membawa berbagai macam senjata tajam dan akan dipimpin oleh Istiajid untuk mengadakan demonstrasi di Kota Wonosari. Tertangkapnya Istiajid pada tanggal 18 September 1948 membuat rencana tersebut gagal dilaksanakan. Orang-orang BTI yang bertanggungjawab atas rencana pengadaan rapat raksasa di Alun-alun Wonosari menjadi kebingungan untuk mencabut perintah akan adanya rapat raksasa yang telah tersebar luas itu, sehingga diantara orang-orang BTI yang merupakan bagian dari PKI ini menjadi saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.²³

Dari dokumen yang berhasil disita tersebut tampak bahwa Gunungkidul dijadikan sebagai batu loncatan bagi kaum komunis untuk menguasai DIY secara keseluruhan. Maksud kaum komunis untuk menguasai

²¹ Suratmin, *loc.cit.*

²² Lihat lampiran 7 gambar 15, Alun-alun Kota Wonosari yang direncanakan sebagai tempat demonstrasi BTI.

²³ Tashadi, (dkk)., *loc.cit.*

Gunungkidul juga sudah tampak sejak jauh-jauh hari sebelum pecahnya peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948, sebagaimana yang terlihat dari persiapan kaum komunis dalam menggalang massa di Gunungkidul. Pemanfaatan PPDI sebagai organisasi pamong desa yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam masyarakat pedesaan membuat PKI mendapatkan dukungan yang cukup kuat, sehingga ketika sewaktu-waktu pecah pemberontakan PKI di Gunungkidul, mereka telah memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Berkat usaha Polisi, tentara, pasukan APS serta segenap lapisan masyarakat yang tetap setia terhadap RI, rencana PKI untuk menguasai Gunungkidul dan seluruh DIY, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengacaukan keamanan dapat digagalkan.

2. Sebagai Perisai Para Pejuang

Sejak awal kemerdekaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah memberikan kepercayaan besar terhadap para ulama, baik ulama di seluruh DIY maupun Gunungkidul. Hal ini terlihat pada saat RI menghadapi serangan Belanda pada bulan November 1945. Sri Sultan mengirimkan utusan ke Gunungkidul dengan membawa *titah*²⁴ agar para ulama di Gunungkidul dikumpulkan untuk selanjutnya dipanggil menghadap Sultan. Menanggapi *titah* dari Sultan, selanjutnya pada tanggal 11 November 1945 para kyai dari seluruh Gunungkidul berkumpul di kantor kabupaten. Berhubung dengan

²⁴ *Titah* adalah keputusan atau perintah yang diberikan oleh seorang raja kepada rakyat ataupun bawahannya. Dalam hal ini adalah perintah yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono XI selaku Raja Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus kepala daerah Provinsi DIY kepada para ulama atau kyai yang ada di Gunungkidul untuk menghadap Sultan guna dimintai pertolongan.

terjadinya serangan Sekutu atas Surabaya pada tanggal 10 November 1945, maka pada tanggal 12 November setelah semua ulama berkumpul, mereka diangkut ke Yogyakarta. Sesuai dengan perintah dari Sri Sultan, rombongan kyai ini dikawal langsung oleh Bupati Gunungkidul KRT. Suryaningrat.²⁵

Maksud dari pemanggilan para kyai dari Gunungkidul oleh Sri Sultan ini adalah untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur kebatinan. Sebagaimana isi dari *titah* Sri Sultan yang dibawa oleh BPH. Guntoro ke Gunungkidul yang berbunyi: “Para Kyai agar berjuang menurut jalan kebatinan, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dan Republik Indonesia terus berlangsung”.²⁶ Sore hari tanggal 12 November 1945 setelah sampai di Yogyakarta, para kyai Gunungkidul yang seluruhnya berjumlah dua puluh delapan orang diterima oleh BPH Guntoro dan dibawa ke Ambarukmo.

Di Ambarukmo para kyai dari Gunungkidul ini diasramakan di Istana Ambarukmo bagian timur. Di tempat itulah para kyai akan menjalankan tugasnya setelah mendapatkan instruksi dari Sri Sultan. Sri Sultan dengan dibersamai oleh BPH. Guntoro memberikan titahnya serta beberapa petunjuk apa saja yang harus dilakukan oleh para kyai selama mereka berada di Istana Ambarukmo. Selanjutnya setelah menyampaikan titahnya Sri Sultan dan BPH. Guntoro meninggalkan Ambarukmo. Sesuai dengan instruksi dari Sri Sultan, KRT. Suryaningrat menyusun staf yang terdiri dari lima orang, dua

²⁵ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁶ *Ibid.*

puluh tiga kyai sisanya dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan alirannya.²⁷

Setelah dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan alirannya masing-masing, KRT. Suryaningrat memerintahkan para kyai untuk segera melaksanakan *titah* Sri Sultan sesuai dengan cara mereka masing-masing pada setiap malam, dan setiap pagi harinya para kyai diwajibkan untuk memberikan laporan atas hasil tirakat mereka pada malam hari itu. Setelah beberapa hari menjalani ritual dan do'a serta berdasarkan hasil laporan yang diberikan oleh para kyai, KRT. Suryaningrat menganggap bahwa tugas para kyai sudah cukup. Pada tanggal 16 November 1945 KRT. Suryaningrat yang dibersamai oleh Kyai Sastropratomo²⁸ datang menghadap Sri Sultan di Gedung Wilis untuk memberikan laporan mengenai hasil yang diperoleh para kyai selama menjalankan tugasnya.²⁹

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Sri Sultan mengenai hasil yang telah didapatkan para kyai dari Gunungkidul, maka Sri Sultan menyatakan bahwa tugas para kyai telah cukup dan mereka diperkenankan untuk kembali ke Gunungkidul. Sebelum mereka pulang, ternyata di Jawa Timur khususnya Surabaya pertempuran antara pasukan TKR yang dibantu oleh rakyat melawan Sekutu masih terus berlanjut. Oleh karena itu para kyai diminta untuk membantu perjuangan rakyat Surabaya di front pertempuran

²⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁸ Kyai Sastropratomo adalah seorang kyai yang menjadi pangarem-arem (penasehat) kamituwo di Kecamatan Playen Gunungkidul.

²⁹ *Ibid.*

dengan segala kemampuan yang dimiliki, mereka diminta untuk menjadi perisai bagi para pejuang. Menanggapi permintaan tersebut akhirnya diputuskan untuk mengirimkan Kyai Sastropratomo ke Jawa Timur, sedangkan yang lainnya tetap tinggal di Yogyakarta berjuang di garis belakang dengan olah kebatinan. Atas perintah Sri Sultan, para kyai belum diperkenankan kembali ke Gunungkidul, mereka tetap berkumpul di Ambarukmo. Sri Sultan kembali mengeluarkan *titah* kepada para kyai untuk menjalankan tugas baru, yaitu berjuang melalui olah kebatinan untuk melawan Sekutu.³⁰

Para kyai kemudian dibagi menjadi empat kelompok, hal ini sesuai dengan empat tujuan yang diinginkan. Kelompok pertama bertugas melalui jalan kebatinan memohon kepada Tuhan agar pihak luar negeri terutama Amerika dan Rusia mau membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaanya. Kelompok kedua berdoa agar kapal laut Sekutu tidak dapat mencapai sasarannya. Hampir sama dengan kelompok kedua, kelompok ketiga berdoa agar pesawat-pesawat musuh juga tidak dapat mencapai sasarannya. Kelompok terakhir atau keempat, berdoa agar para pemuda yang turun di front pertempuran agar selalu berhasil mencapai sasarannya.³¹

Sejak saat itu peranan kyai dalam usaha melawan Sekutu semakin terlihat. Para pejuang selalu meminta petunjuk atau saran dari para kyai

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

sebelum mereka melakukan penyerangan. Para kyai sendiri mendapatkan petunjuk dari Tuhan berupa petunjuk ghaib tentang siasat-siasat perang dan sebagainya, misalnya tentang dari arah mana para pejuang harus melakukan penyerangan terhadap pertahanan musuh. Selain memberikan petunjuk atau saran, tidak lupa para kyai untuk selalu memberikan bekal mental yang mampu menebalkan semangat kepada setiap pasukan yang akan terjun ke medan pertempuran.

Keterlibatan para kyai dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia tersebut membawa pengaruh terhadap para pemuda yang ada di Gunungkidul. Berkat contoh, semangat dan motivasi yang diberikan oleh para kyai, hal itu mampu menarik perhatian para pemuda untuk ikut bertarsipasi dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Para pemuda di Gunungkidul mulai berbondong-bondong masuk dalam berbagai organisasi kelaskaran. Tidak hanya berjuang di daerah mereka sendiri, para pemuda yang telah tergabung dalam organisasi kelaskaran dikirimkan ke berbagai daerah seperti Magelang, Banyubiru, Sronol, bahkan ke Surabaya.³²

Ketika terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1948, tugas yang sama diemban oleh para kyai. Mereka menjadi perisai atau tameng bagi para pejuang dalam menghancurkan pasukan PKI. Para kyai yang sebagian besar telah tergabung dalam APS ini juga selalu berusaha memberikan petunjuk kepada pasukan TNI maupun Pasukan APS sendiri dalam meluncurkan serangannya. Keberadaan para kyai di belakang gerakan pasukan TNI dan

³² *Ibid.*, hlm. 115.

APS membuat semangat dan mental mereka untuk menghancurkan pemberontak semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan para pejuang bahwa perjuangan mereka akan selalu diberkahi oleh Allah melalui perantara para kyai.³³

3. Menumpas Pemberontakan PKI

Pada sore hari tanggal 18 September 1948, berita terjadinya kerusuhan di Madiun sampai di ibukota Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1948 pemerintah RI di Yogyakarta menyatakan bahwa telah terjadi pemberontakan PKI di Madiun. PKI telah merebut alat-alat pemerintahan dengan jalan yang tidak sah. Dalam usaha untuk menggerakkan rakyat agar mau membantu pemerintah RI dalam membasmi pemberontakan PKI, secara bergantian Presiden Sukarno, Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Sukiman, dan Jenderal Sudirman, berpidato melalui RRI, yang pada intinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berjuang bersama menghadapi pemberontakan PKI Musso.³⁴

Sebelum melakukan operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, di Yogyakarta TNI yang terdiri dari Brigade Soeharto dan Brigade Koesno Oetomo terlebih dahulu melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan pemberontakan PKI Madiun. Diantara mereka yang ditangkap adalah Sekretaris Jenderal PKI, Tan

³³ Wawancara dengan Bapak Salim di Piyungan, Bantul pada tanggal 25 Maret 2012.

³⁴ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerekaan Indonesia, Jilid 8, Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: DISJARAH-AD, 1979, hlm. 243.

Ling Jie, anggota Politbiro PKI: Abdul Majid, Maruto Darusman, dan Ngadiman, serta sekitar dua ratus orang pengikutnya. Operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya *efek domino* dari pemberontakan PKI Madiun. TNI juga menutup sementara Percetakan “Canisius” dan “Negara”, karena mereka mencetak surat kabar *Patriot*, *Buruh*, *Revolusioner*, mingguan *Bintang Merah*, dan juga harian *Suara Ibu Kota*, yang berbau komunis.³⁵

Operasi penumpasan pemberontakan PKI dimulai pada tanggal 21 September 1948. Sesuai dengan instruksi dari Presiden Sukarno, maka dalam usaha penumpasan pemberontakan PKI yang berpusat di Madiun ini peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, termasuk badan-badan kelaskaran yang tetap setia kepada pemerintah RI. Sebagai organisasi kelaskaran yang anti komunis, bersama dengan TNI dan Polisi, APS dengan gencar melakukan perlawanan dan penumpasan terhadap pasukan PKI di beberapa daerah. Salah satu daerah yang banyak melibatkan peranan pasukan APS dalam usaha penumpasan pemberontakan PKI adalah Gunungkidul. Sebelum terjadinya kontak fisik antara pasukan APS dengan PKI di Gunungkidul, dalam usahanya menumpas pemberontakan PKI, terlebih dahulu pasukan APS dikirim ke berbagai daerah di sekitar Madiun yang menjadi lokasi awal pemberontakan PKI pada tahun 1948.

Pasukan APS yang pertama kali dikirimkan ke front pertempuran untuk menghadapi pemberontakan PKI Madiun berjumlah satu batalyon yang dipimpin oleh Bachron Edrees. Pasukan APS ini kemudian bergabung dengan

³⁵Mabes ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid II*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hlm 24.

batalyon Kusno Utomo dari TNI yang berpusat di daerah Grobogan, Purwodadi, dan Kudus. Selanjutnya MU-APS kembali mengirimkan satu kompi pasukan bersenjata APS dibawah pimpinan M. Zaini menuju Kudus. Dalam operasi penumpasan PKI di Kudus, berkat kerjasama antara TNI, APS, serta badan perjuangan yang lainnya, para pemberontak dapat ditumpas. Berakhirnya pemberontakan PKI di Kudus membuat suasana kota tersebut dapat kembali aman dan terkendali.³⁶

Di Ponorogo PKI memiliki jumlah pasukan yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah pasukan TNI yang bertugas di daerah itu, sehingga untuk membantu TNI pasukan APS mengirimkan tiga puluh dua pasukannya dibawah komando M. Djohar Suhaemi yang diikuti oleh imam APS Kyai Dalhar dan Kyai Dimyati. Melihat kondisi pasukan gabungan antara TNI dan APS masih kalah jumlah dengan pasukan PKI, satu batalyon pasukan APS yang dipimpin oleh Ir. Sofyan kembali datang ke Ponorogo. Pertempuran yang sengit terjadi di Ponorogo, pasukan gabungan antara TNI dan APS terdesak ke arah barat, bahkan sebanyak dua puluh lima pasukan APS yang dipimpin oleh Ir. Sofyan gugur dalam operasi tersebut.³⁷

Pada awal bulan November 1948 pasukan APS yang dikirim untuk membantu TNI dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun ditarik kembali ke Yogyakarta. Operasi penumpasan PKI di daerah tersebut sebenarnya belum tuntas, namun diperkirakan tidak lama lagi pemberontakan

³⁶ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 68.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

PKI Madiun dapat segera dipadamkan. Keyakinan tersebut berdasarkan kondisi pasukan PKI saat itu yang mulai melemah dan dalam posisi terkepung oleh pasukan TNI. Ditariknya kembali pasukan APS ke Yogyakarta dikarenakan di daerah Gunungkidul ternyata juga timbul pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, sedangkan kekuatan bersenjata dari TNI sedang difokuskan untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun dan menjaga keamanan kota Yogyakarta,³⁸ sehingga diperlukan bantuan dari pasukan APS untuk turut mengamankan Gunungkidul dari aksi huru-hara yang dilakukan oleh PKI.

Pasukan PKI Madiun dan Surakarta yang terdesak ke arah barat mulai masuk ke Gunungkidul melalui Wonogiri, mereka selanjutnya membuat markas pertahanan di Kecamatan Ponjong. Dari Ponjong selanjutnya pasukan PKI mulai melancarkan serangannya terhadap musuh-musuh mereka di Gunungkidul. Kerusuhan yang dilakukan oleh para pelarian PKI Madiun dan Surakarta ini juga mendapatkan dukungan dari orang-orang komunis yang ada di Gunungkidul, sehingga hal ini benar-benar membuat suasana semakin mencekam. Mereka menyerang dan menculik pegawai-pegawai sipil yang tidak mau mendukung mereka. Selain pegawai sipil, mereka juga menjarah bahkan tidak segan-segan untuk membunuh para saudagar kaya di sekitar

³⁸ Pasukan APS Yogyakarta banyak dikirimkan ke berbagai daerah dalam usaha untuk menumpas pemberontakan PKI, padahal di Yogyakarta sendiri sebenarnya juga terjadi kerusuhan yang ditimbulkan oleh orang-orang PKI meskipun skalanya lebih kecil. Karena alasan itu maka TNI di Yogyakarta sendiri dengan bantuan rakyat bisa mematahkan gerakan PKI dalam waktu yang relatif singkat sebagaimana yang disampaikan oleh Letkol. Latif yang dimuat dalam harian *Kedaulatan Rakjat* terbitan Selasa Wage, 28 September 1948.

Gunungkidul, bahkan rakyat kecil yang tidak mau mendukung gerakan mereka juga tidak luput terkena aksi teror.³⁹

Memanasnya situasi di Gunungkidul dimulai pada tanggal 22 September 1948, masyarakat yang mulai geram atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap rumah Jamaah Patuk⁴⁰ pada tanggal 24 September 1948. Adanya berita tersebut membuat orang-orang PKI tidak terima, sehingga pada malam harinya terjadi keributan di Semanu, namun sebelum keadaan semakin parah polisi berhasil mencegahnya. Keadaan terus memanas, orang-orang PKI yang mulai merasa dalam posisi tidak aman terus menyebarkan provokasi dan isu-isu yang meresahkan masyarakat.⁴¹ Pada tanggal 23 September 1948 dari Baran, Rongkop, dikabarkan bahwa Wonosari telah diduduki oleh Pemerintah Tentara Rakyat (Musso), selain Wonosari mereka juga telah menduduki Wuryantoro pada tanggal 22 September 1949, dan akan menduduki Baturetno dan Pracimantoro pada tanggal 23 dan 24 September 1948.⁴²

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ranto Suwito di Rongkop, Gunungkidul pada tanggal 12 Februari 2012.

⁴⁰ Kelompok Diskusi Patuk atau Jamaah Patuk adalah salah satu kelompok kiri yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Gunungkidul. http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Madiun. diakses pada tanggal 25 Januari 2012.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ranto Suwito di Rongkop, Gunungkidul pada tanggal 12 Februari 2012.

⁴² Wawancara dengan Bapak Parmo Sentono, lihat juga Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 116.

Pada tanggal 27 September 1948, mata-mata PKI dan dua orang bersenjata lengkap masuk ke Wonosari dari Pracimantoro melalui Baran dengan menggunakan mobil . Kedatangan mereka ke Wonosari untuk melihat bagaimana kondisi Wonosari pasca pemberontakan PKI Madiun dan melihat kemungkinan bisa tidaknya orang-orang PKI untuk merebut Wonosari. Usaha mereka berhasil digagalkan oleh Polisi, karena pada saat melalui Kantor Polisi Wonosari mobil mereka dihadang oleh Polisi. Mobil mereka disita, sedangkan orang-orangnya dikirim ke Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak militer.⁴³

Keadaan di Gunungkidul semakin memanas,⁴⁴ sedangkan bantuan kekuatan militer dari Yogyakarta yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi maka Polisi, pasukan APS, dan rakyat mencoba untuk tetap menjaga keamanan Gunungkidul dengan kekuatan dan senjata seadanya. Pada tanggal 1 Oktober 1948 di sebelah utara Semin terjadi pertempuran antara pasukan Siliwangi dengan pasukan pemberontak, sedangkan sore harinya diberitakan bahwa di Manyaran, sebelah timur Semin terdapat satu kompi Tentara Rakyat (PKI Musso) dan laskar campuran yang kurang lebih berjumlah delapan ratus orang yang siap melancarkan serangan terhadap siapa saja yang mencoba

⁴³ *Ibid.*, hlm. 117.

⁴⁴ Lihat lampiran 10 gambar 13, peta daerah-daerah yang terkena dampak kerusuhan PKI di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 1948.

menghalangi dan melawan tindakan mereka.⁴⁵ Dari Nglipar dilaporkan bahwa Panewu Nglipar diserang oleh Pemuda Rakyat dari Klaten yang dipimpin oleh Kariyosudarmo.⁴⁶

Untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, Polisi dengan kekuatan yang sangat terbatas mengirimkan sepuluh personilnya ke Nglipar. Tidak hanya di Nglipar, pada tanggal 2 Oktober 1948 asisten Wedana Manyaran Semin juga diserang oleh pengacau, sedangkan di Ponjong penewu dengan juru tulisnya serta beberapa pengawal lainnya diculik. Melihat kondisi yang demikian maka Polisi Wonosari kembali mengirimkan personilnya ke Ponjong. Jumlah personil Polisi di Wonosari masih sangat terbatas, sedangkan kerusuhan yang ditimbulkan oleh pasukan pengacau terus meluas, disinilah peranan pasukan APS sangat dibutuhkan untuk membantu memulihkan keamanan dan ketertiban di Gunungkidul.⁴⁷

Dalam menghadapi serangan dari PKI tersebut, pasukan bersenjata APS dari Yogyakarta dikirimkan untuk membantu pasukan APS yang ada di Gunungkidul. Untuk menggempur gerakan PKI di seluruh Gunungkidul pasukan APS membuat markas pertahanan dari tingkat kecamatan sampai

⁴⁵ Wawancara dengan Cipto Sumarno di Semin, Gunungkidul, pada tanggal 15 Februari 2012.

⁴⁶ Kariyosudarmo merupakan salah seorang anggota PKI di Gunungkidul. Sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Jawatan Keamanan Nglipar, ketika dilakukan pembersihan terhadap orang-orang PKI atau yang memiliki hubungan dengan Peristiwa Madiun oleh Polisi Wonosari pada malam hari tanggal 18 September 1948 dia berhasil melarikan diri ke Klaten. Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 116.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

tingkat desa di tiga belas kecamatan, dengan jumlah pasukan yang paling besar ditempatkan di Semin.⁴⁸ Langkah tersebut membuat pergerakan PKI di Gunungkidul menjadi tidak bebas lagi, pergerakan mereka dapat dengan mudah diawasi oleh pasukan APS. Di Baran, sebelah tenggara Gunungkidul yang berbatasan dengan Pracimantoro, PKI masih berusaha untuk membuat kekacauan dengan melakukan penjarahan dan teror terhadap masyarakat. Untuk mengantisipasi pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi, APS, dan tentara yang didatangkan dari Yogyakarta berhasil menghancurkan gerakan tersebut.⁴⁹

Berkat kerjasama yang baik antara Polisi, pasukan APS, TNI, dan dukungan dari masyarakat, maka pemberontakan PKI di berbagai daerah Gunungkidul yang terjadi hampir lebih dari satu bulan sejak terjadinya peristiwa Madiun dapat dipadamkan. Pasukan PKI terdesak mundur dan keluar dari Gunungkidul ke Wonogiri melalui desa Manyaran. Setelah para pemberontak berhasil dihalau, tugas Polisi, APS, dan tentara adalah melakukan operasi pembersihan terhadap orang-orang yang membahayakan

⁴⁸ Penempatan pasukan dalam jumlah yang besar di Semin dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor letak geografis Semin yang berbatasan dengan daerah-daerah yang sedang menghadapi pemberontakan PKI yaitu Wuryantoro dan Eromoko (Wonogiri), sehingga untuk mengantisipasi masuknya para pelarian PKI dari kedua daerah tersebut (seperti yang terjadi di Ponjong), perlu dilakukan penjagaan yang ketat di daerah Semin. Wawancara dengan Bapak Cipto Sumarno di Semin, Gunungkidul, pada tanggal 15 Februari 2012.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Parmo Sentono di Rongkop, Gunungkidul pada tanggal 12 Februari 2012.

ataupun yang terlibat dalam aksi pemberontakan PKI.⁵⁰ Dampak dari aksi pembersihan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan PKI tersebut mengakibatkan kerugian besar dalam bidang kepegawaian Gunungkidul, hal ini dikarenakan banyak pegawai pemerintah yang terlibat dalam aksi pemberontakan PKI.⁵¹

C. APS Pasca Penumpasan Pemberontakan PKI di Gunungkidul

1. Menghadapi Agresi Militer Belanda II

Keberhasilan penumpasan PKI di Gunungkidul bukan menjadi akhir dari perjuangan pasukan APS untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Sesuai dengan tujuan awal pembentukan APS untuk membantu TNI dalam usaha melawan penjajah Belanda, maka APS sebagai sebuah badan kelaskaran tidak akan dibubarkan begitu saja sebelum Belanda benar-benar mengakui kedaulatan RI. Pasukan APS yang kembali ditarik ke Yogyakarta dari Gunungkidul pada akhir November 1948 tidak dapat beristirahat lebih lama, karena ujian yang lebih besar telah datang, yaitu agresi militer Belanda II.

⁵⁰ Pemberontakan PKI pada tahun 1948 memang berhasil ditumpas, namun sayang sebelum oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut diadili, Belanda kembali menyerang RI dengan agresi militernya yang kedua. Akibatnya, banyak diantara oknum-oknum yang sempat ditahan tersebut berhasil meloloskan diri, dan tujuh belas tahun kemudian (1965) mencoba kembali mengadakan pemberontakan terhadap RI. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hlm.156.

⁵¹ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 120.

Keterlibatan pasukan APS dalam aksi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Agresi Belanda II dimulai sejak hari pertama pasukan Belanda melakukan serangan atas Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Pasukan APS bersama dengan TNI bekerjasama dalam menghadang masuknya tentara Belanda ke Ibukota Yogyakarta. Kontak fisik antara pasukan APS dengan tentara Belanda tidak dapat dihindarkan, akibatnya lima orang pasukan APS gugur dalam pertempuran itu. Pasukan APS selanjutnya bertahan di Karang Kajen, dari sana pasukan APS terus melakukan gerilya selama seminggu untuk menyerang pasukan Belanda di dalam kota. Belanda ternyata mengetahui keberadaan markas pasukan APS, maka dilakukan penyerangan ke Karang Kajen, akibat dari penyerangan tersebut empat orang pasukan APS gugur di medan pertempuran.⁵²

Pada tanggal 8 Januari 1949 bersama dengan TNI pasukan APS melakukan penyerbuan ke Yogyakarta untuk mengusir pasukan Belanda. Dalam penyerbuan tersebut pasukan APS dipimpin oleh Imam besar K.H. A. Machfudz dan komandan APS Moh. Sjarbini. Serbuan tersebut berhasil membuat pasukan Belanda tercerai-berai, namun TNI, pasukan APS, serta badan-badan perjuangan yang lain tidak menduduki Yogyakarta, mereka kembali ke markasnya di daerah Bantul. Ternyata tidak semua pasukan APS ikut kembali ke markas, karena sebanyak dua regu pasukan yang dipimpin oleh Abdullah Mabrur masih meneruskan perang gerilya ke dalam kota,

⁵² Wawancara dengan Bapak Salim di Piyungan, Bantul pada tanggal 25 Maret 2012.

mereka bermarkas di Sonosewu. Pada tanggal 14 Januari 1948 Belanda melakukan operasi besar-besaran ke Sonosewu, pasukan APS yang hanya terdiri dari dua regu tanpa mendapatkan bantuan dari TNI yang telah mundur ke Bantul harus berjuang melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Akibatnya tiga belas pasukan APS gugur dalam pertempuran tersebut, sedangkan yang lainnya berhasil meloloskan diri.⁵³

Selain di Yogyakarta, pertempuran antara pasukan APS dan tentara Belanda juga terjadi di Gunungkidul. Sebelum masuknya Belanda ke Gunungkidul, MU-APS telah menyusun kekuatan yang dipusatkan di Kecamatan Panggang dengan M. Hani bertindak sebagai imam, Harun Al-Rosyid dan Mawardi sebagai komandan dan wakil komandan pertempuran.⁵⁴ Mereka selanjutnya membagi kekuatan di tiap-tiap kecamatan kecuali Tepus dan Rongkop untuk dilatih bergerilya dalam menghadapi tentara Belanda. Dalam usahanya tersebut, MU-APS menjalin kerjasama dengan Komando Distrik Militer III (KDM III) yang terdiri dari sepuluh Komando Onder Distrik Militer (KODM) yang tersebar di Gunungkidul.⁵⁵

⁵³ Dari ketiga belas pasukan APS yang gugur dalam serangan Belanda atas markas APS di Sonosewu tersebut terdapat nama Zuhri yang tidak lain adalah anak dari Ki Bagus Hadikusumo (Penasehat MU-APS) dan Mubarrak, anak dari K.H. Machfudz (imam APS). Mereka yang menjadi korban rata-rata adalah anak-anak yang berusia lima belas tahun. Djarnawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjoengan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Persatuan, 1979, hlm. 41-42.

⁵⁴ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 125.

⁵⁵ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 75-76.

Serangan Belanda atas Gunungkidul ditujukan untuk mencari para pemimpin republik yang melarikan diri pada saat penyerbuan mereka atas Yogyakarta. Belanda selanjutnya mendirikan Markas di Wonosari dan Playen, akibatnya di kedua daerah tersebut seringkali terjadi serbuan secara gerilya oleh pasukan APS maupun TNI yang bertugas di daerah Gunungkidul. Untuk mengantisipasinya, maka tentara Belanda selalu berusaha untuk mencari markas-markas gerilyawan yang ada di Gunungkidul. Markas APS cabang Wonosari yang berada di Kedungpring pada tanggal 9 Maret 1949 diserang oleh tentara Belanda. Dalam pertempuran di Wonosari tersebut empat orang pasukan APS gugur, mereka adalah Al Ustadz Abdul Jabar, Ahmad Hisyam, Muh. Bustam Syah dan Muh. Bachrom.⁵⁶

Selain terlibat langsung dalam pertempuran menghadapi Belanda, pasukan APS juga aktif berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di Bantul dan Kulonprogo. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat selama agresi militer Belanda II berlangsung. Tindakan kriminal tersebut berupa perampokan, penggarongan, pencurian dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu MU-APS mengambil kebijakan untuk bertindak mengamankan dan mengatur pemerintahan darurat agar kehidupan rakyat menjadi tenang. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, di Bantul pasukan APS juga mendirikan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan

⁵⁶ Ahmad Adabi Darban, "Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS)". *Istoria*, Vol. 3 No. 1, September 2007, hlm.17-18.

sekitar dua ribu orang personil TNI dan Polisi sampai keadaan kembali stabil.⁵⁷

Puncak dari peranan pasukan APS dalam perjuangan menghadapi agresi militer Belanda II terjadi pada saat terjadinya serangan umum 1 Maret 1949 atas kota Yogyakarta. Selain ikut langsung masuk ke dalam kota, pasukan APS banyak ditugaskan diperbatasan-perbatasan untuk menghalangi masuknya tentara Belanda yang akan memberikan bantuan ke dalam kota.⁵⁸ Di dalam kota, pertempuran antara pasukan gabungan TNI dan beberapa pasukan kelaskaran terus mendesak tentara Belanda. Setelah terjadi pertempuran selama enam jam, pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta.

Akibat kekalahan tersebut, pasukan Belanda mendatangkan bantuan dalam jumlah besar dari Magelang, akibatnya TNI yang menguasai kota memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dan kembali ke markas masing-masing untuk melakukan perang gerilya. Belanda kembali menduduki Yogyakarta, untuk itu TNI dan pasukan APS terus melakukan perang gerilya baik di dalam maupun di luar kota. Menerima serangan gerilya tersebut Belanda kemudian melakukan serangan balasan terhadap markas APS di Kauman pada tanggal 24 Mei 1949. Belanda menyerang Kauman secara membabi-buta dengan menembaki setiap laki-laki yang ditemuinya. Dalam

⁵⁷ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 70.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

serangan itu empat orang warga Kauman anggota APS gugur, mereka adalah H. Iljas, H. Barozie, Syafi'i dan Zaidun.⁵⁹

2. Kembali Ketengah-tengah Masyarakat

Perjuangan seluruh lapisan rakyat Indonesia selama terjadinya revolusi fisik di Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya membawa hasil yang memuaskan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Maret 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi perintah penghentian aksi militer Belanda dan pengembalian para pimpinan RI yang ditawan oleh Belanda ke Yogyakarta. untuk melaksanakan resolusi tersebut maka pada tanggal 7 Mei 1949 diadakan persetujuan Roem-Royen. Akhirnya pada tanggal 30 Juni 1949 pasukan Belanda meninggalkan kota Yogyakarta, yang diikuti dengan mulai kembalinya pasukan TNI yang melakukan perang gerilya dari luar kota Yogyakarta.⁶⁰

Setelah peristiwa pengembalian kedaulatan atas Indonesia dari Belanda, maka pemerintah mengumumkan bahwa perang telah selesai, dengan demikian peranan APS sebagai laskar pembantu TNI dirasakan sudah cukup. Keadaan di Yogyakarta dan sekitarnya secara berangsur-angsur mulai membaik. Pada bulan September 1949 pemerintah kembali mengadakan rasionalisasi angkatan bersenjata, selain TNI tidak ada lagi angkatan bersenjata di Indonesia, termasuk organisasi kelaskaran. MU-APS sebagai organisasi kelaskaran yang lahir dari rakyat akhirnya juga harus kembali ke

⁵⁹ Ahmad Adabi Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang, 2000, hlm. 70.

⁶⁰ Suratmin, *op.cit.*, hlm. 89.

rakyat. Yang menarik adalah pembubaran pasukan APS tidak dilakukan melalui upacara resmi seperti saat pembentukannya, pembubaran pasukan APS hanya ditandai dengan kembalinya pasukan APS ke tengah-tengah masyarakat.

Perjuangan APS dalam bidang militer telah selesai, MU-APS juga telah dibubarkan, namun peranan ulama dalam bidang agama tetap terus berjalan. Mereka tidak lagi mengatasnamakan sebagai APS namun dengan organisasi-organisasi keagamaan yang menaungi mereka, terutama Muhammadiyah. Pasukan APS kembali ketengah-tengah masyarakat untuk kembali menekuni profesi mereka sebelum bergabung dalam APS. Mereka kembali menjadi petani, pedagang, pegawai, guru, ulama, dan lain-lainnya. Pasukan APS juga ada yang berasal dari golongan pelajar, maka setelah APS bubar dan kondisi telah stabil, mereka kembali melanjutkan menuntut ilmu baik di sekolah-sekolah maupun pondok pesantren.⁶¹

Selain kembali ke masyarakat menekuni profesi mereka sebelumnya, ada juga sebagian anggota pasukan APS yang melanjutkan karir di dunia militer dengan masuk menjadi anggota TNI. Untuk menjadi anggota TNI dibutuhkan syarat-syarat yang cukup formal dan rumit, sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang mau dan mampu masuk ke TNI, sedangkan sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk kembali menekuni pekerjaan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Salim di Piyungan, Bantul pada tanggal 25 Maret 2012

mereka sebelumnya dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai anggota veteran.⁶²

⁶² *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang paling bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta menjadi tanda dimulainya zaman baru bagi bangsa Indonesia, yakni zaman kemerdekaan. Pada perkembangannya proklamasi tersebut ternyata bukan menjadi akhir perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi imperialisme asing, karena Belanda kembali datang ke Indonesia untuk kembali menguasai negara yang baru saja mereka ini. Usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia mereka tunjukkan dengan melakukan serangan terhadap berbagai kota penting di Indonesia. Menghadapi situasi yang demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia selain berjuang sekuat tenaga untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka masuklah bangsa Indonesia ke dalam babak sejarah baru perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan masa revolusi fisik dari tahun 1945-1949.

Pada tanggal 23 Juli 1947 atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1367 H., di Masjid Taqwa yang berada di Kampung Suronatan Yogyakarta para ulama di Yogyakarta sepakat membentuk sebuah badan perjuangan militer yang akan diperbantukan kepada TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, badan tersebut diberi nama Laskar Angkatan Perang Sabil yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi Askar Perang Sabil (APS) sedangkan wadah bagi organisasi pimpinannya disebut Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS). Dalam organisasi APS banyak terdapat tokoh-tokoh yang sebelumnya tergabung dalam Hizbullah dan Sabillilah yang sempat dibubarkan oleh

pemerintah setelah Indonesia merdeka, sehingga APS bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari kedua organisasi tersebut.

Organisasi ini adalah sebuah organisasi militer yang berada di bawah TNI, sehingga setiap gerakannya terlebih dahulu harus mendapatkan komando dari TNI. APS berkembang tidak hanya di dalam kota Yogyakarta, namun juga di tiap-tiap kabupaten di DIY, bahkan hingga tingkat kecamatan. Sebelum terjun dalam medan perang, terlebih dahulu pasukan APS mendapatkan pelatihan dan pembinaan, baik pembinaan mental, spiritual, fisik dan yang lainnya. Setelah dianggap siap maka pasukan APS kemudian banyak diperbantukan dalam medan petempuran di berbagai daerah, tidak hanya di Yogyakarta tetapi juga di daerah-daerah yang lain. Dalam perjuangannya, sebagai sebuah organisasi kelaskaran yang bernafaskan Islam, APS selalu menggunakan ayat-ayat suci Al Qur'an serta As Sunnah sebagai dasar atau landasan perjuangannya serta sebagai pembangkit motivasi dan semangat dalam bertempur.

Pada tahun 1948 terjadi peristiwa yang sangat disayangkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, disaat para pemimpin bangsa Indonesia tengah mencurahkan segenap kemampuannya dalam usaha berunding dengan pihak Belanda, ternyata Partai Komunis Indonesia (PKI) justru mencoba menusuk dari belakang. Mereka membuat kerusuhan di berbagai tempat yang puncaknya adalah terjadinya Peristiwa Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini selanjutnya mulai meluas ke berbagai daerah, salah satunya adalah di Gunungkidul, kabupaten yang terletak di ujung tenggara Provinsi DIY. Pemberontakan PKI di Gunungkidul bukan hanya sebagai dampak dari Peristiwa

Madiun, tetapi merupakan suatu rencana yang telah jauh-jauh hari dipersiapkan sebagaimana yang dapat dilihat dari aktivitas orang-orang PKI di Gunungkidul.

Tanpa disadari oleh pemerintah pusat, ternyata PKI sudah mulai menancapkan pengaruhnya jauh sebelum terjadinya Peristiwa Madiun. Bahkan sebelum Indonesia merdeka mereka sudah mulai menghimpun masa di Gunungkidul. Mereka dengan cerdas memanfaatkan kondisi alam serta masyarakat Gunungkidul untuk menjadikan daerah ini sebagai basis gerakan mereka di DIY. Sebelumnya mereka juga telah berhasil mencetak kader-kader yang cukup militan dalam melaksanakan perintah-perintah partai. Dari kader-kader inilah mereka dapat menyebarkan pengaruh komunis kepada masyarakat Gunungkidul dengan berbagai macam propaganda dan janji yang muluk-muluk.

Peristiwa pemberontakan PKI di Gunungkidul dimulai setelah masuknya pasukan FDR/PKI yang melarikan diri dari peristiwa penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, Pacitan, dan Wonogiri. Tapi sebelum terjadinya pemberontakan di Gunungkidul yang disebabkan oleh masuknya para pelarian tersebut, sudah ada rencana dari PKI untuk membuat kekacauan di Gunungkidul dan daerah-daerah lain di DIY sebagaimana yang terungkap dalam dokumen yang berhasil disita oleh polisi Gunungkidul. Akibat dari operasi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi yang dibantu tentara dan pasukan APS pada malam hari tanggal 18 September 1948, rencana untuk menguasai Gunungkidul dan sekitarnya oleh PKI secara terorganisir dapat digagalkan.

Terungkapnya rencana PKI untuk menguasai Gunungkidul dan sekitarnya bukan berarti gerakan PKI kemudian berhenti begitu saja, meskipun tidak

terorganisir dengan baik, namun dengan jumlah pendukung yang relatif banyak dan jiwa militansi yang mereka miliki, mereka tetap membuat kekacauan di berbagai daerah di Gunungkidul. Akibat dari pemberontakan itu APS Yogyakarta mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan APS Gunungkidul dalam menumpas pemberontakan PKI. Dalam usahanya mereka kemudian bergabung dengan Polisi dan TNI menumpas pemberontakan PKI Gunungkidul yang terjadi pada tahun 1948. Usaha penumpasan pemberontakan PKI di Gunungkidul dan beberapa daerah yang lain selain sebagai bentuk komitmen untuk selalu berjuang membantu TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk usaha mereka dalam menumpas paham komunis di Indonesia, sebuah paham yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Keberhasilan penumpasan pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul serta seluruh rangkaian perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah hasil dari perjuangan bersama antara TNI dan seluruh lapisan masyarakat tanpa bermaksud menonjolkan salah satu pihak dan mengesampingkan pihak lain untuk mencari siapa yang paling berperan. Salah satu pihak yang tidak boleh dikesampingkan tentunya adalah pasukan APS, pasukan relawan yang berjuang dengan sepuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali balasan dari Allah SWT, sebagaimana yang selama ini mereka jadikan semangat untuk terus berperang menumpas kedzaliman dan mempertahankan kemerdekaan RI, semangat *jihad fii sabillilah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, MT. (1990). *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan.
- Ahmad Adabi Darban. (2000). *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- _____, (dkk.). (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Atmakusumah (ed.). (1982). *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Barnet, Kevin.. (1981). *Pengantar Teologi*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Cholisin. (2002). *Militer dan Gerakan Prodemokrasi: studi analisis tentang respons militer terhadap gerakan prodemokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Darto Harnoko dan Poliman. (1986). *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djarnawi Hadikusumo. (1979). *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjoengan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Persatuan.
- Dudung Abdurahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana.
- Geertz, Clifford. (1976). *Agriculture Involution*. a.b. S. Supomo, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Gottschalk, Louis. (1982). *Understanding History*. a.b. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hadari Nawawi. (1993). *Kepemimpinan Menurut Islam Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan Alatas, Syed. (1980). *Bahaya Komunis*. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

- Hasan Sadily. (1984). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Helius Sjamsudin. (2007). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Hersri Setiawan. (2000). *Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*. Forum Studi Perubahan dan Peradaban (FUSPAD).
- Ibrahim Lubis. (1976). *Islam Membendung Arus Komunisme*. Jakarta: Telaga Bening.
- I Gde Widja. (1989). *Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. (1988). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Salatiga: Satya Wacana.
- Jurusan Pendidikan Sejarah. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY.
- Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul. (1983). *Gunungkidul dalam Angka*. Gunungkidul: Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Kementerian Penerangan. (1953). *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- _____. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lembaga Kader. (t.t). *Komunisme dan Agama*. Djatinegara: Lembaga Kader.
- Mabes ABRI. (1995). *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid I, II*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Maksun, (dkk). (1990). *Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohammad Iskandar, (dkk). (2000). *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.

- Nakamura, Mitsuo. (1983). *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. a.b. Yusron Asropie, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasiwan. (2010). *Teori-Teori Politik Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nasution, A.H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8, Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung.
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI-DEPHANKAM.
- Ramli, M. (dkk.). (2003). *Memahami Konsep Dasar Islam*. Semarang: UPT MKU UNNES.
- Ricklefs, M.C. (1998). *A History of Modern Indonesia*. a.b. Dharmono Hardjowidjono. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sardiman, AM.. (2000). *Panglima Besar Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- _____. (2004). *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publising.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sayadiman Suryohadiprojo. (1981). *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang: Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta: Intermasa.
- Sekretariat Negara RI. (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid I: 1945-1949*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Selo Soemardjan. (1981). *Social Changes in Yogyakarta*. a.b. H.J. Koesoemanto. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suratmin, (dkk.). (1990). *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. (1995). *Askar Perang Sabil sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Phisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra.

Sutrisno Kutoyo (ed.). (1976). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suwarno, PJ. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius.

Syaifullah. (1997). *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tashadi (dkk.). (2000). *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Depdiknas.

Vey Mc., Ruth T. (2009). *The Rise of Indonesian Communism*. a.b. Tim Komunitas Bambu, *Kemunculan Komunisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Majalah/Jurnal

Ahmad Adabi Darban. (2007). “Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS)”. *Istoria*, Vol. 3 No. 1, hlm. 14.

Sartono Kartodirdjo, “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektif Struktural”. *Prisma*, No. 8, Agustus 1981, hlm. 4.

Syahrudin Darwis, “Muhammadiyah dan Gerakan Reformis Islam di Indonesia”. *Driyarkara*, Tahun XXIII No.2, 1997, hlm. 69.

Skripsi

Maryanti, (2006), *Peranan Askar Perang Sabil (APS) Dalam Perang Kemerdekaan di Yogyakarta (1947-1949)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.

Nur'aini Setiawati, (1988), *Askar Perang Sabil; Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Republik Indonesia, di DIY 1945-1949*, Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.

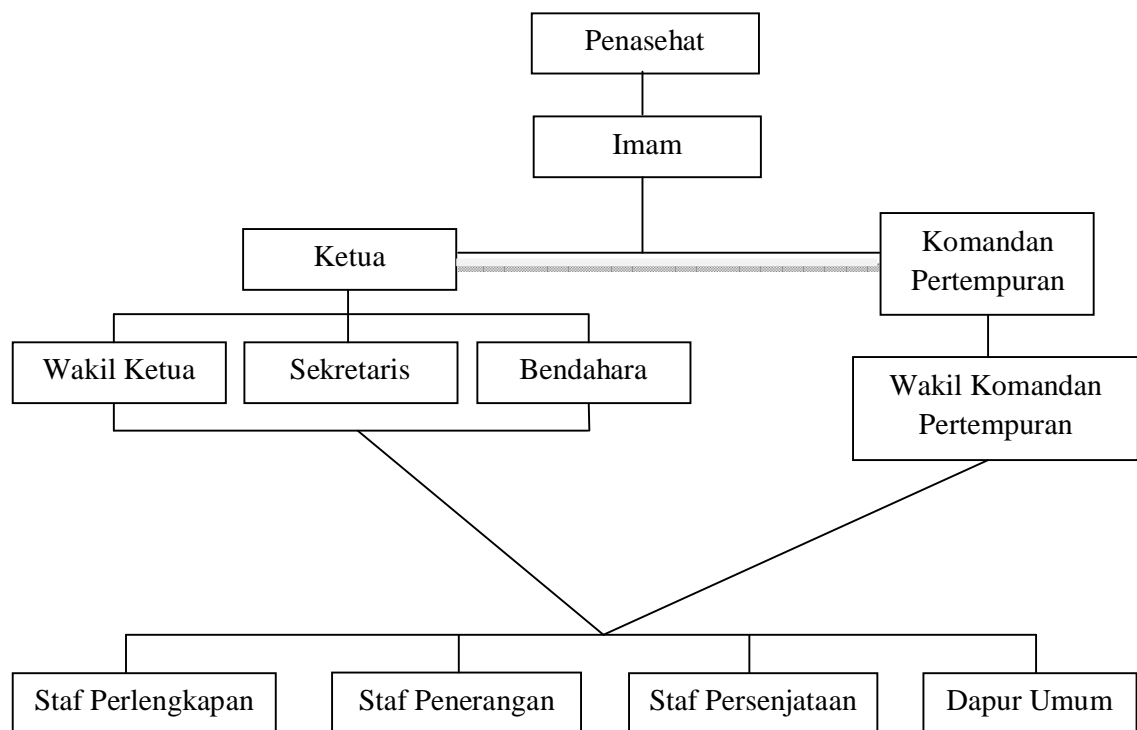
Daftar Informan

Nama	Jabatan (tahun 1948)	Alamat
Salim (85)	Pasukan APS	Piyungan, Bantul
Cipto Sumarno (86)	Ketib (Pembantu Naib)	Semin, Gunungkidul
Parmo Sentono (82)	Dukuh	Rongkop, Gunungkidul
Ranto Suwito (83)	Relawan (dapur umum)	Rongkop, Gunungkidul
Kartono (79)	Tani	Girisubo, Gunungkidul

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi MUAPS

STRUKTUR ORGANISASI MUAPS TINGKAT PUSAT



Setiap kabupaten memiliki Imam

Bantul : K. Mathori

Sleman: K. Abdurrahman

Kulonprogo : K. H. Bahlia

Gunungkidul : K. H. Hisyam

Keterangan:

———— Hubungan Langsung

----- Hubungan Kerjasama

Sumber: Suratmin. (1996). *Askar Perang Sabil sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra.

Lampiran 2. Salinan Serat Kekancingan

SERAT KEKANTJINGAN DALEM NGARSA DALEM SAMPEYAN DALEM
INGKANG SINUWUN KANGDJENG SULTAN NGAJOGYOKARTA HADININGRAT

Dhumateng:

MARKAS 'ULAMA Ngajogyakarta

Ingsun ingkeng Sinuwun Kangdjeng Sultan Ngajogyakarta Hadiningrat. Wus anampi pasowane 1. Ki Bagus Hadikusuma, 2. Kjai H. Mahfudz Siradj lan 3. Kjai H. Ahmad Badawi, minangka wewakile para ulama ing Ngajogyakarta, kang perlu hangundjukake hatur panuwune para Ulama ing Ngajogyakarta sawuse pada nindakake i'tikaf munadjat marang Gusti Allah ana ing masjid "TAQWA" kampung Suranatan Ngajogyakarta nalika dina malem tanggal kaping 17 sasi Pasa tahun 1879 Djawi, utawa kaping 23 sasi Juli 1948.

Mungguh kang dadi hatur panuwune para 'Ulama mau :

Njuwun berkah idi pangestu Dalem anggone para 'Ulama anduweni nijat hanganakake: "LASKAR ANGKATAN PERANG SABIL" perlu ambijantu Pemerintah Republik Indonesia ananggulangi mungsuh kang sumedya hangrubuhake kamardikane Negara Republik Indonesia. Awit nalikane tahun 1947 Republik Indonesia kang ora diduduki tentara keradjaan Belanda mung kari hing Daerah Istimewa Ngajogyakarta.

Marmane ing samengko kang dadi kaparengge karsaningsun:

Amaringi berkah idi pangestu marang apa kang dadi hatur panuwune para 'ulama kasebut ndhuwur.

Sabanjure murih kelakone, betjik rerembungan karo Bapak Jenderal Sudirman.

Ngajogyakarta Hadiningrat

Tanggal kaping 17 sasi Pasa 1879

utawa

Surja kaping 23 sasi Juli 1948.

Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan

Ngajogyakarta Hadiningrat.

Ttd.

Sumber: Suratmin. (1996). *Askar Perang Sabil sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra.

Lampiran 3. Tokoh-Tokoh Askar Perang Sabil (APS)



Gambar 1. Ki Bagus Hadikusumo, penasehat APS.

(Sumber: <http://www.muhammadiyah.or.id/content-160-det-ki-bagus-hadikusuma.html>, diakses tanggal 23 Maret 2012)



Gambar 2. K.R.H. Hadjid, Ketua APS.

(Sumber: <http://www.muhammadiyah.or.id/content-162-krh-hadjid.html>, diakses tanggal 23 Maret 2012)

Lampiran 4. Lambang PKI dan Tokohnya, Amir Syarifuddin.



Gambar 3. Palu Arit, lambang Partai Komunis Indonesia

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia.htm, diakses tanggal, 23 Maret 2012)



Gambar 4. Amir Syarifuddin, Ketua FDR/PKI Tahun 1948.

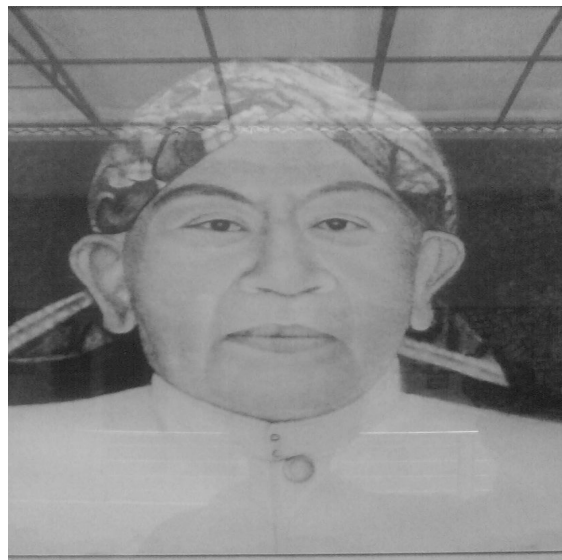
(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Amir_Sjarifoeddin.htm, diakses tanggal, 23 Maret 2012)

Lampiran 5. Tokoh-tokoh Sipil yang Mendukung Terbentuknya APS



Gambar 5. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur DIY

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Sultan_Hamengkubuwono_XI.htm, diakses tanggal, 23 Maret 2012)



Gambar 6. K.R.T. Suryaningrat, Bupati Gunungkidul

saat terjadinya Pemberontakan PKI 1948.

(Sumber: Koleksi Perpustakaan Kab. Gunungkidul, diambil tanggal 20 Maret 2012)

Lampiran 6. Tokoh-Tokoh Militer yang Mendukung Terbentuknya APS



Gambar 7. Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI.

(Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Soedirman.htm>, diakses tanggal, 23 Maret 2012)



Gambar 8. Bung Tomo, salah satu pelatih kemiliteran APS.

(Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Soetomo.htm>, diakses tanggal, 23 Maret 2012)

Lampiran 7. Bendera APS



Gambar 9. Bulan Bintang di atas lafadz kalimat Syahadat pada bendera APS

(Sumber: Nur'aini Setiawati, (1988), *Askar Perang Sabil; Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Republik Indonesia, di DIY 1945-1949*, Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.)

Lampiran 8. Markas dan Tempat Latihan APS di Yogyakarta



Gambar 10. Masjid Agung Yogyakarta tempo dulu, Markas sekaligus tempat latihan APS

(Sumber: <http://www.google.com/search?q=masjid+yogyakarta&hl=en&prmd=imvns&source>, diakses tanggal 23 Maret 2012)



Gambar 11. Alun-alun Utara Yogyakarta, tempat latihan pasukan APS.

(Sumber: <http://www.google.com/search?q=alun-alun+utara+yogya&hl=en&prmd=imvns&source>, diakses tanggal 23 Maret 2012)

Lampiran 9. Salah Satu Tempat Terjadinya Peristiwa Pemberontakan PKI di Gunungkidul



Gambar 12. Alun-alun Kabupaten Gunungkidul, tempat BTI merencanakan demonstrasi besar-besaran.

(Sumber: dokumen pribadi, diambil tanggal 20 Maret 2012)

Lampiran 10. Peta Pemberontakan PKI di Gunungkidul Tahun 1948



KETERANGAN:



Daerah-daerah yang menjadi tempat terjadinya pemberontakan PKI

Gambar 13. Sketsa peta pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul.

(Sumber: dokumen pribadi berdasarkan data-data dari Tashadi (dkk.). (2000), *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Depdiknas.)